



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

## ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN  
SEKRETARIAT KABINET  
TAHUN 2019

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan. Melalui Sasaran Strategis, **"Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral"**, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membantu tugas Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden selaku Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretaris Kabinet.

LKj Tahun 2019 menyajikan informasi tentang pencapaian Indikator Kerja Utama Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Masukan dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan LKj ini, terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman maupun Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta,      Maret 2020

Plt. Asisten Deputi Bidang Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Banyu Alam Badru, S.H.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai kewajiban untuk melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan secara hierarki.

Capaian sasaran kinerja **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”**, diukur melalui indikator **“Persentase Rancangan Rekomendasi yang disetujui”** oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasi yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. *Output* terdiri dari Rancangan Rekomendasi Atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan; Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU; serta Rancangan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden; di bidang energi dan sumber daya mineral.

Capaian *output* Rancangan Rekomendasi di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman sejumlah 318 Rancangan Rekomendasi (100%), yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman/Sekretaris Kabinet/Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait, maupun Presiden.

Pencapaian Sasaran Strategis **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral”**, telah menyerap anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun 2019 berjumlah Rp 2.700.779.402,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- atau sebesar 98,21%.

Meskipun Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menunjukkan berbagai capaian, namun masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.

Dalam rangka mengatasi kendala, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan teknologi informasi *E-Government* yang salah satunya adalah Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Pengembangan SITAP tersebut selaras dengan dikeluarkannya Inpres 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, SITAP dijadikan sebagai alat untuk memantau tindak lanjut seluruh arahan Presiden pada rapat terbatas, sidang kabinet, kunjungan kerja atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Presiden, oleh kementerian/lembaga terkait.

Meskipun sudah berjalan dan diterapkan, namun dalam pelaksanaan penggunaan SITAP masih belum optimal dari pihak Sekretariat Kabinet maupun dari pihak Kementerian Koordinator. Selain itu fitur yang ada di dalam SITAP juga masih terus dikembangkan agar dapat menunjang kebutuhan kerja masing-masing unit kerja.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>Daftar Tabel</b> .....	v
<b>Daftar Gambar</b> .....	vi
<b>Daftar Foto</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	2
C. Gambaran Aspek Strategis Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	8
D. Sistematika Penyajian .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019</b> .....	<b>13</b>
A. Gambaran Perencanaan Kinerja Tahun 2019 .....	13
B. Penetapan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	13
C. Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	16
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja .....	19
E. Peningkatan Sumber Daya Manusia .....	20
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 - 2019</b> .....	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	23
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja.....	37
C. Gambaran Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 .....	40
D. Realisasi Anggaran .....	64
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Rekomendasi .....	71
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja .....	15
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama .....	17
Tabel 3.1.	Perbandingan jumlah <i>output</i> dan <i>outcome</i> di Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 - 2019 .....	29
Tabel 3.2.	Peraturan Presiden (Perpres) Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Telah Ditetapkan Presiden Tahun 2019 .....	30
Tabel 3.3.	Uraian Capaian Tindak Lanjut Arahan Presiden Di Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral s.d. Tahun 2019 .....	32
Tabel 3.4.	Kategori Pencapaian Kinerja .....	37
Tabel 3.5.	Realisasi Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 .....	66
Tabel 3.6.	Perbandingan Anggaran dan Capaian <i>Output</i> Tahun 2018 dan 2019 .....	67
Tabel 3.7.	Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	68

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral .....	4
Gambar 1.2.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	7
Gambar 1.3.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan .....	7
Gambar 1.4.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	8
Gambar 1.5.	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.	8
Gambar 1.6.	Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIPT) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 .....	12
Gambar 3.1.	Perbandingan Capaian di bidang Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 .....	25
Gambar 3.2.	Perbandingan Realisasi Capaian di bidang Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 .....	26
Gambar 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja di bidang Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 .....	27
Gambar 3.4.	Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) .....	57
Gambar 3.5.	Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri .....	59
Gambar 3.6.	Perbandingan persentase dan realisasi penyerapan anggaran Asdep Bidang ESDM Tahun 2015-2019 .....	68

## DAFTAR FOTO

Foto 3.1	Rapat Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak dan Proyek Petrokimia, di Kantor Sekretariat Kabinet .....	43
Foto 3.2.	Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Dukungan Percepatan Proyek GRR Tuban, Kec. Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur .....	43
Foto 3.3.	Deputi Bidang Maritim Menjadi Salah Satu Narasumber Sosialisasi Perpres Nomor 9 Tahun 2019 di Padang, Sumatera Barat, tanggal 24 April 2019 .....	44
Foto 3.4.	Bersama Narasumber dan Kepala Daerah Regional Sumatera dalam acara Sosialisasi Perpres Nomor 9 Tahun 2019 di Padang, Sumatera Barat, tanggal 24 April 2019 .....	44
Foto 3.5.	Kondisi Gunung Batok, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang Ditinggalkan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) .....	47
Foto 3.6.	Forkom Litbang ke 30 TA 2019 dengan tema "Pemanfaatan Thorium Sebagai Alternatif Sumber Energi Untuk Kepentingan .....	57
Foto 3.7.	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan untuk Percepatan Pembangunan PLTSa di Kota Surabaya di TPA Benowo, tanggal 15 November 2019 .....	64



**A. LATAR BELAKANG**

 manat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai target kinerja yang ditetapkan, yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya, dalam penyusunannya didasarkan pada rencana strategis yang telah ada, diikuti dengan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja dan kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan.

Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet, memiliki kewajiban mengawal pencapaian visi dan misi Presiden dan pembangunan nasional, untuk membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan manajemen kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman dibantu oleh Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **B. GAMBARAN ORGANISASI ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas dan fungsi berikut.

### **B.1. Tugas dan Fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **Tugas Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### **Fungsi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah energi dan sumber daya mineral;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral;

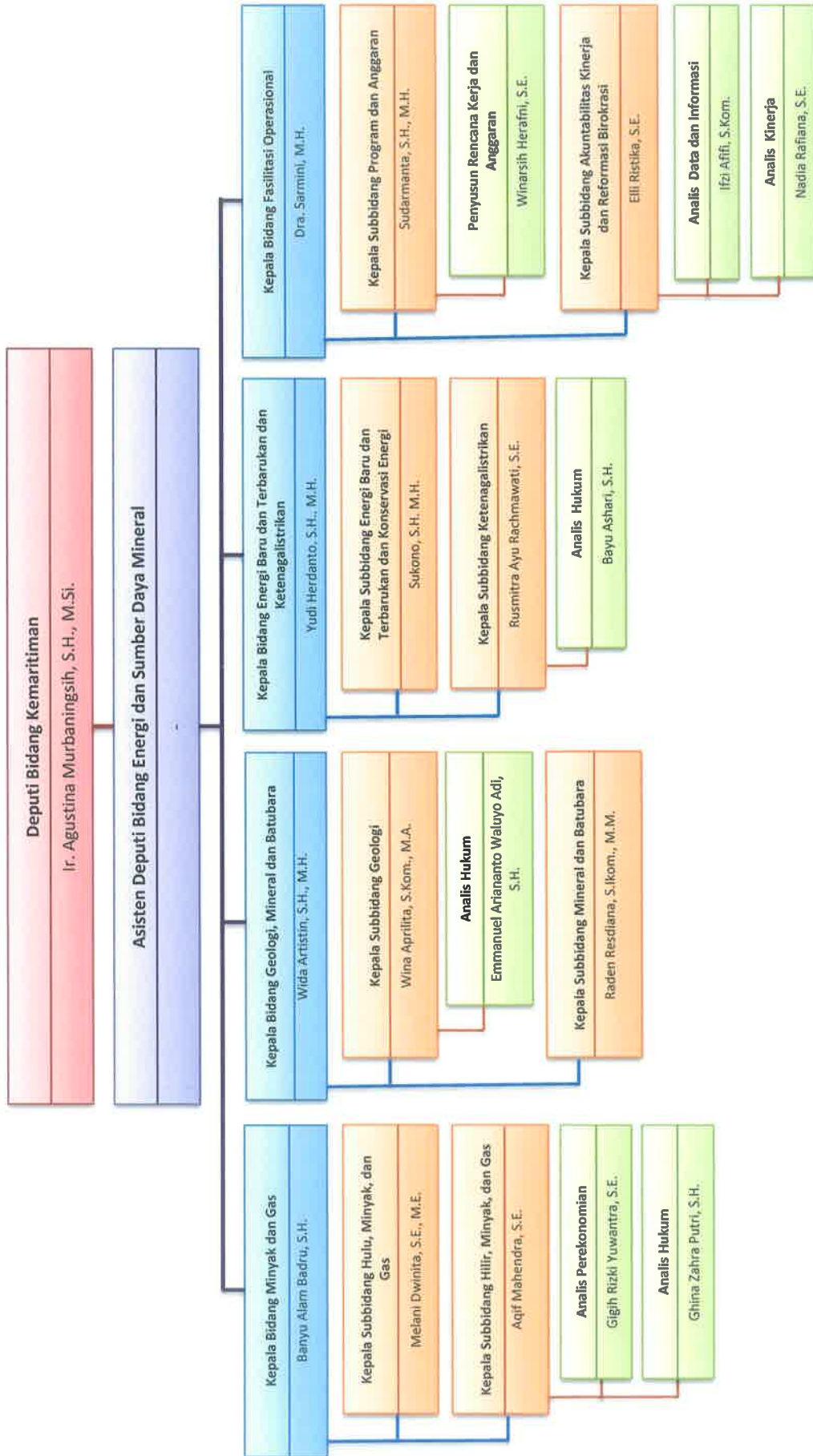
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

## **B.2. Struktur Organisasi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1.

**Struktur Organisasi  
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**



Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 (tiga) Bidang sebagai berikut:

**B.2.a) Bidang Minyak dan Gas**

Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang minyak dan gas.

Bidang Minyak dan Gas terdiri dari :

- a) Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
- b) Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

**B.2.b) Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara**

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang geologi, mineral, dan batubara.

Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara terdiri dari :

- a) Subbidang Geologi; dan
- b) Subbidang Mineral dan Batubara.

**B.2.c) Bidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Ketenagalistrikan**

Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi baru dan terbarukan, dan ketenagalistrikan.

Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan terdiri dari :

- a) Subbidang Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan
- b) Subbidang Ketenagalistrikan.

**B.2.d) Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitas Operasional**

Bidang Fasilitas Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman.

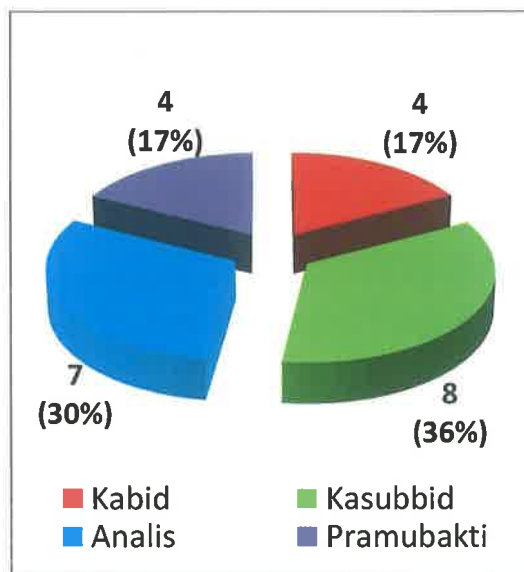
Bidang Fasilitas Operasional terdiri dari :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

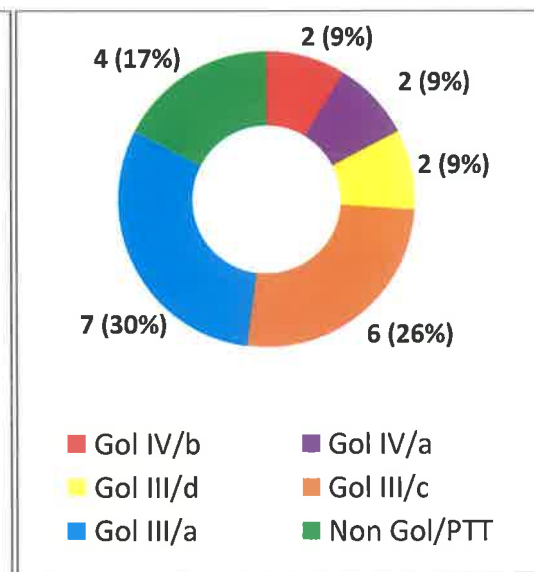
### B.3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber Daya Manusia pada Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 12 orang yang menduduki jabatan struktural, dan 11 orang lainnya adalah staf/pegawai dengan jabatan sebagai Analis dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Namun untuk saat ini Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak mempunyai Pejabat Eselon II definitif dikarenakan telah pensiun per 1 Desember 2018. Data jabatan dan komposisi kepangkatan sebagaimana pada diagram di bawah:

**Gambar 1.2.**  
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

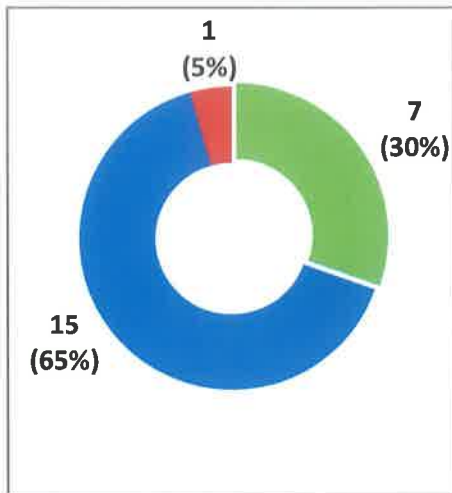


**Gambar 1.3.**  
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

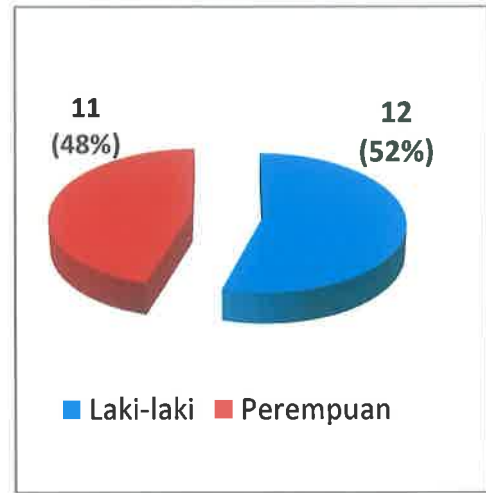


Sementara itu, apabila dilihat dari latar belakang strata jenjang pendidikan, dapat dirinci: S-2 (7 orang), S-1 (15 orang), dan SLTA (1 orang). Sedangkan dilihat dari status kepegawaian, bahwa 19 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), dan 4 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Data seperti pada gambar diagram berikut:

**Gambar 1.4.**  
Proporsi Jumlah Pegawai  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



**Gambar 1.5.**  
Proporsi Jumlah Pegawai  
Berdasarkan Jenis Kelamin



### C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*) ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Setiap organisasi selalu meningkatkan eksistensinya untuk memenuhi tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks, oleh karena itu sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis mengenai lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

#### C.1. Analisis Lingkungan Organisasi

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

##### C.1.a) Kekuatan Organisasi (*Strengths*)

Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai



kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang jelas dalam melaksanakan manajemen kabinet, sehingga Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- e. Terbukanya kesempatan mengikuti Diklat/Seminar/*Workshop* yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

#### **C.1.b) Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)**

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mewaspadaikan kelemahan yang ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal.
- d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan;

- f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

#### **C.1.c) Peluang Organisasi (*Opportunities*)**

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman.

#### **C.1.d) Tantangan Organisasi (*Threats*)**

Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
- c. Praktek KKN yang masih berlangsung;
- d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif.

## C.2. Strategi Organisasi

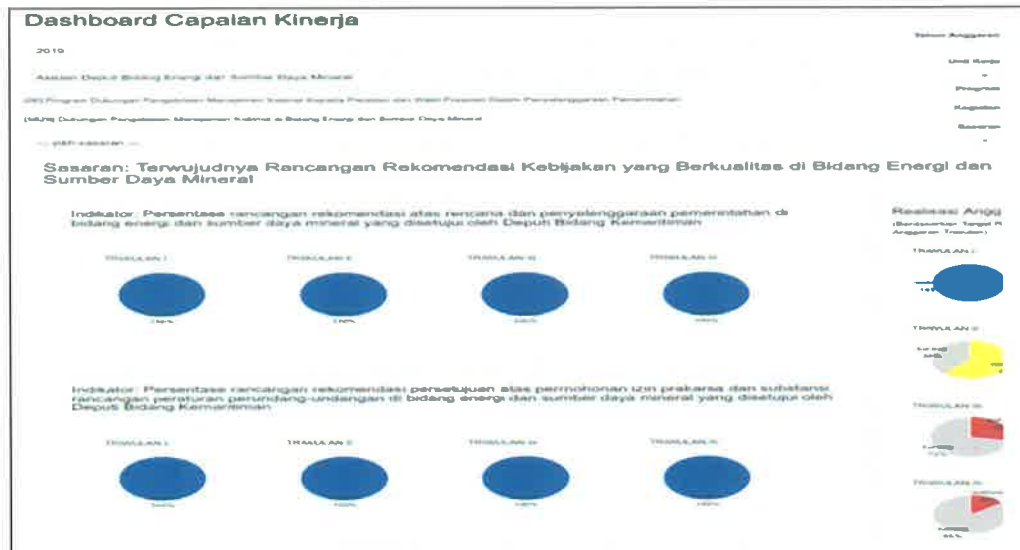
Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. Mendukung penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kedeputian Kemaritiman dan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara konsisten dan menyeluruh;
4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dipantau melalui pengukuran indikator kinerja. Dalam memonitoring capaian kinerja dari level Eselon I sampai Eselon IV saat ini Asdep Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Dengan aplikasi tersebut, capaian *output* dan *outcome* dari level Eselon I hingga eselon IV dimonitoring setiap triwulan dan dilaporkan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dapat

terlihat dalam gambar 1.2., bahwa pada tahun 2019 besaran capaian *output* dan *outcome* Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berada pada angka 100%.

**Gambar 1.6.**  
**Dashboard Sistem Informasi Kinerja Terpadu Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019**



#### D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019, sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas profil Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019.

**Bab II Perencanaan Kinerja Tahun 2019** Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2019.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015 - 2019.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2019 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

### A. GAMBARAN PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategik instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja merupakan komitmen bagi instansi, berupa dokumen yang memuat sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan sasaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada sasaran strategis tersebut dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia serta kemungkinan adanya kendala yang dihadapi. Mengacu pada sasaran Deputy Bidang Kemaritiman, sasaran strategis Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempresentasikan tugas dan fungsinya (tusi) yaitu perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah, dan pengamatan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2015-2019, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan yaitu dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang energi dan sumber daya mineral melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada hasil *output* yang diharapkan sesuai nomenklaturanya.

### B. PENETAPAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN DAN SUMBER DAYA MINERAL 2019

Penetapan Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan dan indikator kinerja untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan, yang

didukung anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2019. Sasaran Program/Kegiatan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu *“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral”*, dan *“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman”*.

Namun demikian, pencapaian sasaran tersebut, pada dasarnya merupakan kepanjangan dari upaya untuk mewujudkan Nawa Cita sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya membangun dan memajukan bidang energi dan sumber daya mineral, Presiden antara lain memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan membangun kilang minyak dan pipa gas baru sebagai program prioritas nasional.

Perencanaan Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung suksesnya pencapaian Program Prioritas Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, tersebut disusun sebagaimana pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Perjanjian kinerja berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya perjanjian kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang

dicapai serta membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kerjanya.

Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama, untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2019.

Adapun tujuan dari disusunnya PK Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2019;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**PERJANJIAN KINERJA**

Satuan Organisasi : Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral  
Tahun : 2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Energi	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	dan Sumber Daya Mineral	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	B (78,06)
		2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku	100 %

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, dengan kriteria (Perpres Nomor 29 tahun 2014):

- a. spesifik (*specific*);
- b. dapat terukur (*measurable*);
- c. dapat dicapai (*attainable*);
- d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
- e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun dan menetapkan indikator dan target yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.2.  
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asdep ESDM dalam penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; dan pemantauan, pengamatan, serta penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep ESDM dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan mengajukan kepada Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang energi dan sumber Daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang energi dan sumber Daya mineral yang disampaikan oleh Asdep ESDM kepada Deputi Bidang Kemaritiman}} \times 100 \%</math> </p>
		<p>2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asdep ESDM dalam penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep ESDM terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait persetujuan atas permohonan izin Prakarsa dan substansi RPUU di bidang energi Dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait persetujuan atas permohonan izin Prakarsa dan substansi RPUU di bidang energi Dan sumber daya mineral yang disampaikan oleh Asdep ESDM kepada Deputi Bidang Kemaritiman}} \times 100 \%</math> </p>
		<p>3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asdep ESDM dalam penyiapan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon</p>

		<p>dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</p>	<p>memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asdep ESDM terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman _____ X 100 %</p> <p>Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan Terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disampaikan oleh Asdep ESDM kepada Deputi Bidang Kemaritiman</p>
--	--	--	---

Perhitungan capaian Indikator Utama yang selanjutnya disebut *outcome* didasarkan pada manual indikator kinerja Kedeputusan Bidang Kemaritiman, yaitu “Menyetujui/menyampaikan lebih lanjut kepada pihak lain/merespon/memanfaatkan”, hal tersebut dimaknai bahwa Deputi Bidang Kemaritiman menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memberikan disposisi lebih lanjut atau dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet. Perhitungan capaian untuk masing-masing IKU menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rancangan rekomendasi di bidang energi Dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman}}{\text{Jumlah rancangan rekomendasi di bidang energi Dan sumber daya mineral yang disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman}} \times 100\%$$

Guna pelaksanaan target kinerja tersebut, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun 2019 mendapatkan dukungan anggaran total Rp. 2.750.000.000

## **D. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI MANAJEMAN KINERJA**

### **D.1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputy Bidang Kemaritiman serta Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,

Adapun visi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: "Menjadi Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang profesional dan andal dalam mendukung Deputy Bidang Kemaritiman di bidang energi dan sumber daya mineral." Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: "Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Deputy Bidang Kemaritiman dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang energi dan sumber daya mineral".

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unit kerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **D.2. Pengembangan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting di era modern saat ini, baik sektor pemerintahan maupun swasta. Dalam sektor pemerintahan, dengan adanya teknologi informasi, sangat memudahkan dalam melakukan komunikasi dan akses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja suatu organisasi. Dalam hal informasi Sekretariat Kabinet memiliki peran yang

strategis yaitu terkait dengan informasi kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, atau Pertemuan lainnya sebagai Arahan Presiden. Peran Sekretariat Kabinet adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan *debottlenecking*.

Guna mendukung pelaksanaan dan tugas tersebut, dilakukan pengembangan aplikasi antara lain :

a. SIPT (sistem Informasi Persuratan Terpadu)

Aplikasi persuratan berbasis internet yang real time, pengembangan aplikasi ini memudahkan pengajuan berkas secara berjenjang sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Aplikasi ini juga mendorong pelaksanaan e-government di lingkungan Sekretariat Kabinet.

b. SITAP (Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden)

Aplikasi berbasis intranet yang dimanfaatkan oleh Sekretariat Kabinet untuk digitalisasi Arahan dan Janji Presiden saat Sidang Kabinet, Rapat Terbatas, atau Pertemuan lainnya. SITAP juga digunakan untuk melakukan monitoring tindak lanjut Arahan dan Janji Presiden yang diisi oleh Kementerian Koordinator.

Dengan dikembangkannya aplikasi SIPT, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak perlu lagi menghitung secara manual.

## **E. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Guna meningkatkan *capacity building*, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti beberapa Diklat, Bimtek, maupun Workshop, yaitu :

### **E.1. Diklat Struktural**

Pada tahun 2019, ada 2 (dua) orang pegawai pada Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 dan 1 orang Diklatpim Tk. IV. 2 orang tersebut semuanya dinyatakan lulus Pelatihan Dasar CPNS dengan baik. Diklat tersebut menghasilkan 2 macam proyek aktualisasi sebagai berikut:

1. Infografis Perpres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Dalam Rangka Mendukung Implementasi Kebijakan Bidang Geologi oleh Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, S.H.
2. Pembuatan Database Bidang Minyak dan Gas di Sekretariat Kabinet oleh Ghina Zahra Putri, S.H.
3. Diklatpim Tk. IV selama 3 bulan oleh Aqif Mahendra, S.E. di BDPKN BPK Yogyakarta.

## **E.2. Diklat Teknis dan Fungsional Dalam Negeri**

Guna meningkatkan *capacity building*, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengikutsertakan pejabat/pegawai pada beberapa *Workshop/Seminar* dan *Forum Group Discussion (FGD)* pada tahun 2019, sebagai berikut:

1. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada tanggal 23 s.d. 24 Februari 2019, di Bogor;
2. FGD tentang Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan *Geopark* pada tanggal 4 Maret 2019, di Bandung;
3. Pelatihan *IT Infrastructure*, tanggal 11 - 13 April 2019, di Bandung;
4. FGD Alternatif Lahan Strategis Proyek *Grass Root Refinery*, tanggal 24 April 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta;
5. FGD tentang konektivitas Bandar Udara Yogyakarta *International Airport (YIA)* dengan kawasan perkotaan dan Kawasan Strategis Nasional (KSPN) tanggal 20-21 Juni 2019 di Yogyakarta;
6. Pelatihan Tata Cara Sistem Pengelolaan Penggunaan Anggaran Negara, pada tanggal 14 s.d. 16 Agustus 2019, di Lembaga Pelatihan Lutar, Jakarta;
7. Pelatihan *Basic Counseling Batch II*, pada tanggal 29 Agustus s.d. 2 September 2019, di Hotel Sparks Luxe, Jakarta
8. FGD tentang Kajian Strategis "Penajaman Konsep Masterplan Percepatan Pembangunan Perekonomian Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 22-23 September 2019 di Semarang;


9. FGD tentang Penyiapan *Master Plan* Percepatan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah tanggal 25-26 September 2019, di Semarang;
10. FGD tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, tanggal 20 November 2019, di Bogor;

### **E.3. Kegiatan *Workshop*/Seminar/FGD/Konferensi di Luar Negeri**

Penugasan ke luar negeri, pejabat dan pegawai Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis substansi rekomendasi kebijakan dan perumusan kebijakan nasional maupun implementasi kebijakan yang disepakati dalam perjanjian internasional, yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, serta dalam rangka perumusan kebijakan maupun menambah wawasan SDM di bidang energi dan sumber daya mineral menghadiri kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pelatihan *Leadership and Management Training* yang diselenggarakan oleh *Corporate Coach Group*, pada tanggal 9-14 September 2019, di Manchester, United Kingdom;
2. Delegasi RI pada *Santiago Climate Change Conference* tanggal 30 November – 9 Desember 2019 di Santiago Chile.

#### A. CAPAIAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2019

 Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja melalui proses yang sistematis, dimulai dengan mengumpulkan, menganalisis untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan, diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja ditetapkan guna mengukur keberhasilan pencapaian semua indikator yang ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan atas suatu program/kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan, melalui analisis keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien, membandingkan antara realisasi dengan target tahun bersangkutan. LKj harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlunya menganalisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Adapun kategori capaian kinerja dapat didasarkan pada skala ordinal, oleh karenanya perlu ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet.

##### A.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2019

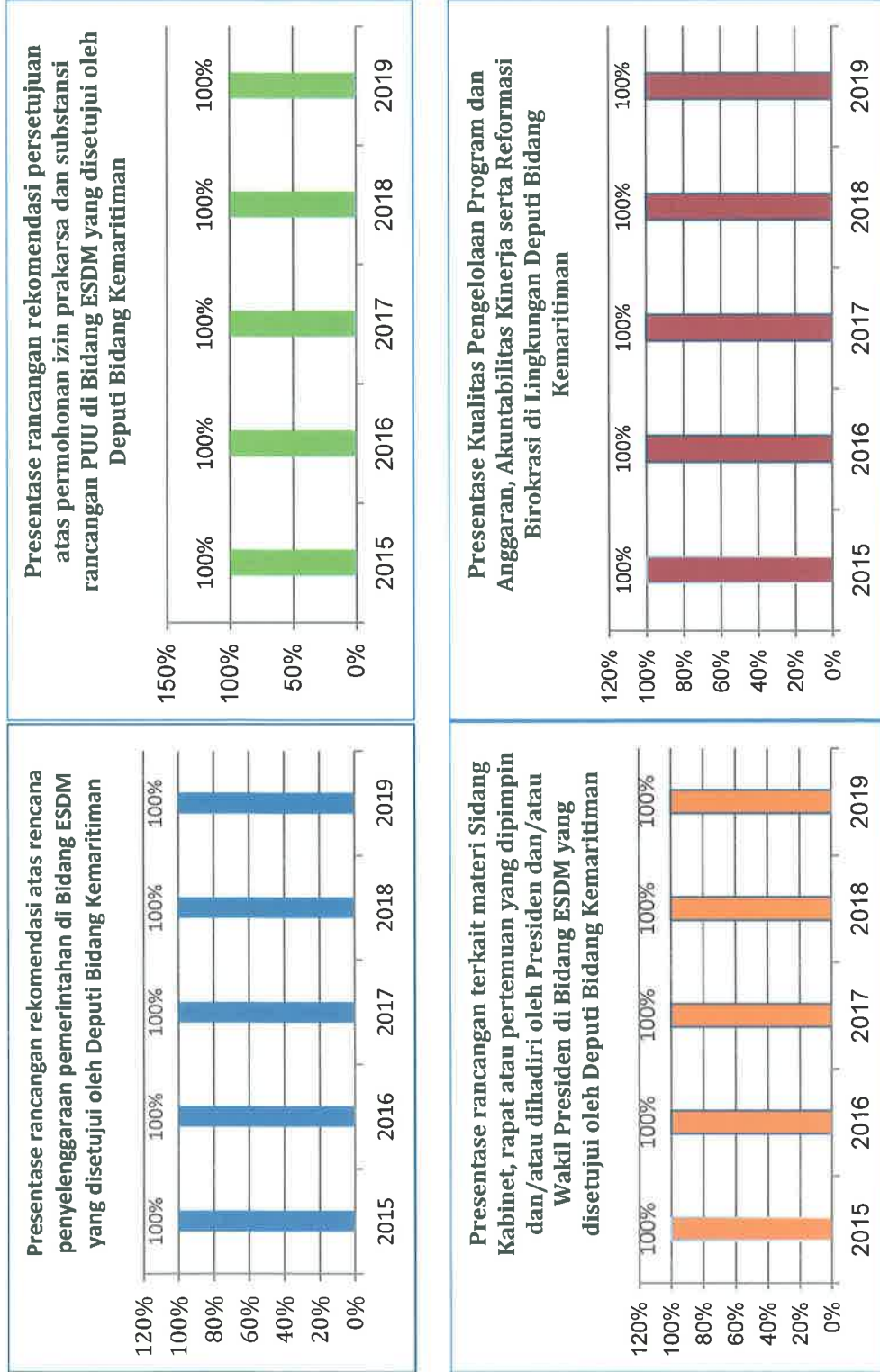
Jumlah capaian Tahun 2015 - 2019, yang berupa rancangan rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Deputi Bidang Kemaritiman/Sekretaris Kabinet, berupa memo keluar, surat keluar Deputi, Surat keluar Sekretariat Kabinet, *briefing sheet*, bahan sidang kabinet/rapat terbatas, maupun bahan pidato/butir wicara Presiden yang berasal dari Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral, dapat berupa penanganan berkas masuk atau penugasan (*top down*) maupun yang bersifat inisiatif (*bottom up*), baik yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran (ATK index pegawai).

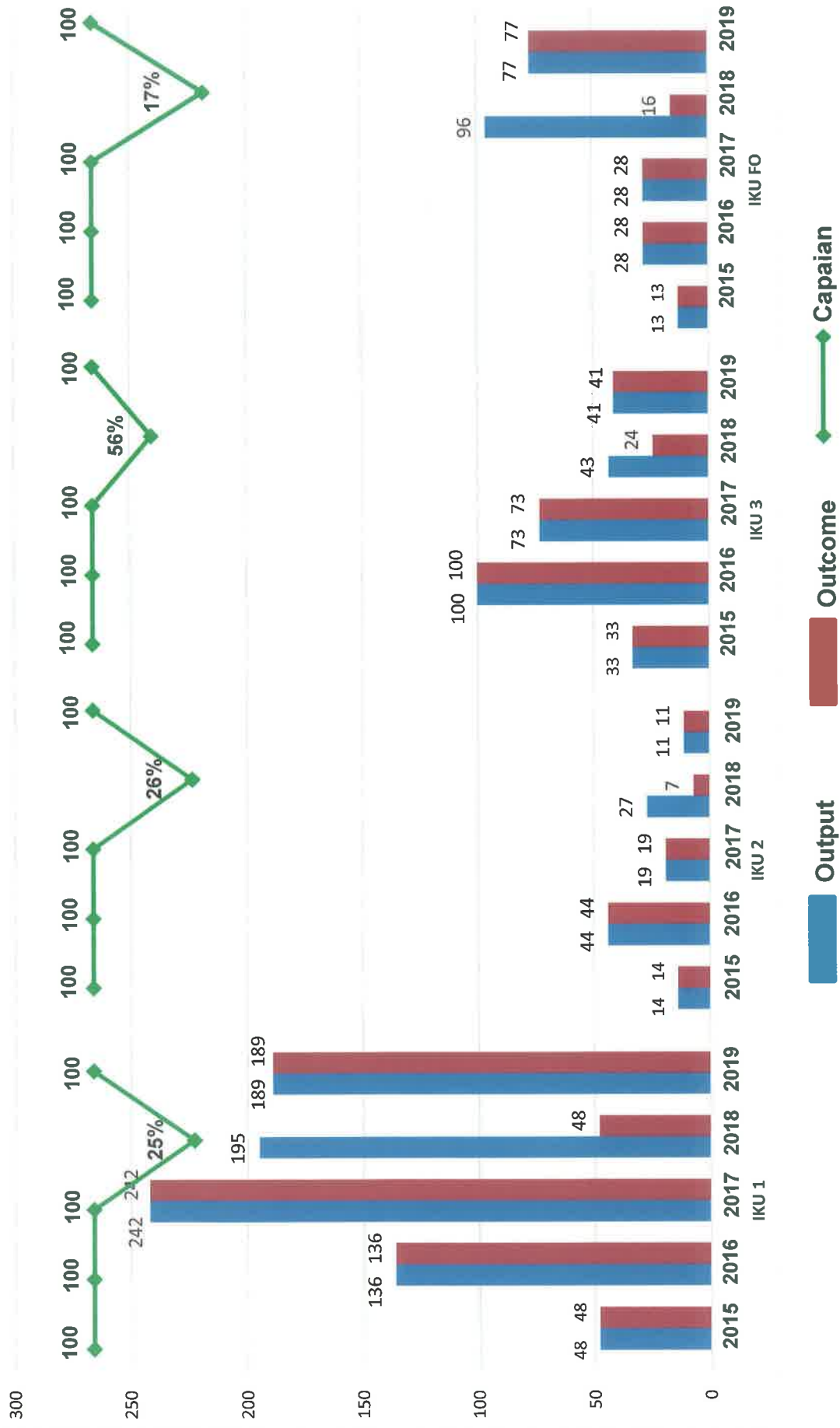
Adapun rincian capaian *output* dan *outcome* sasaran kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sesuai Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana gambar berikut:



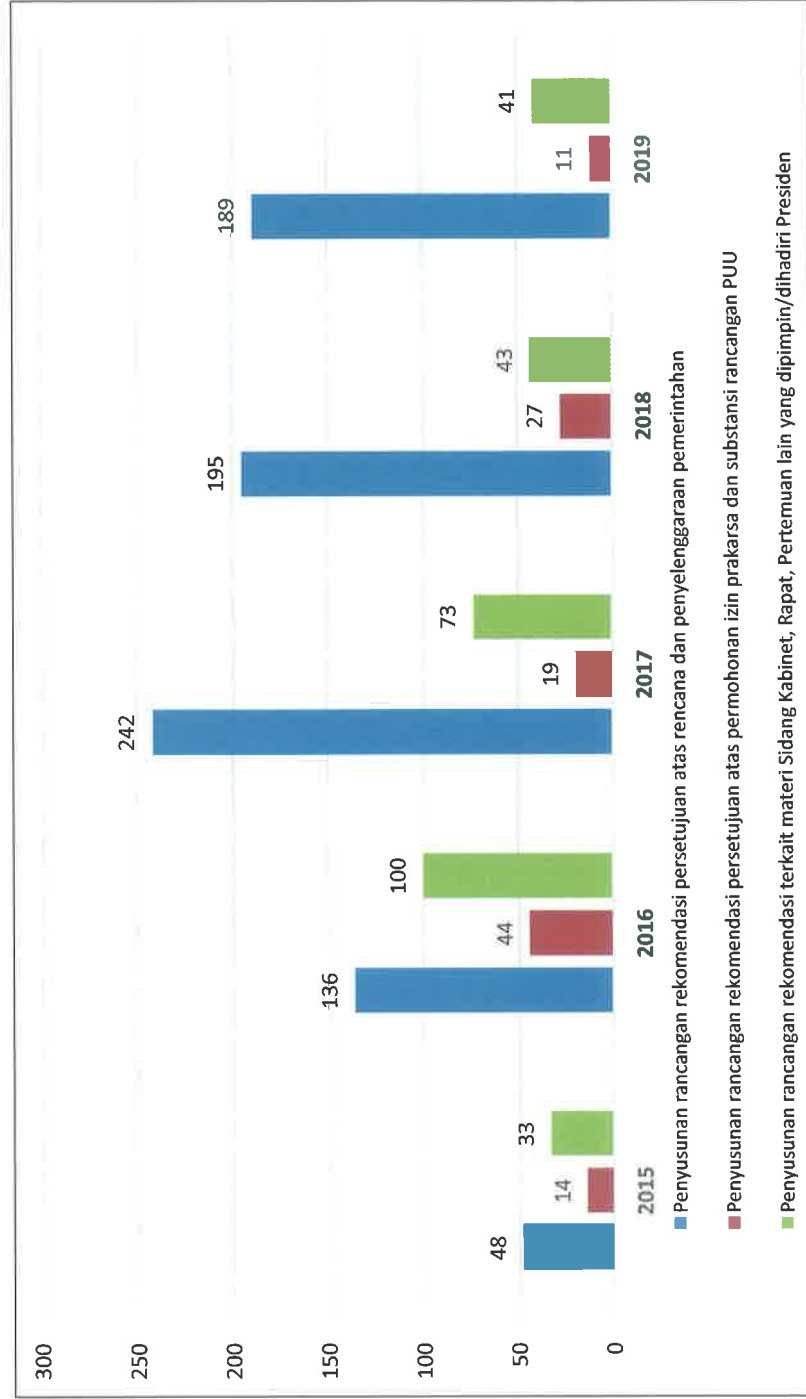
Gambar 3.1.  
Perbandingan Capaian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral



Gambar 3.2.  
Perbandingan Realisasi Capaian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019



Gambar 3.3.  
Perbandingan Capaian Kinerja di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019



Terlihat dalam gambar 3.1. pada tahun 2019 capaian Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada masing-masing indikator mencapai 100%. Berarti pada tahun 2019, seluruh rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Deputi Bidang Kemaritiman telah disetujui atau mendapatkan arahan lebih lanjut, maka capaian Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019 sesuai target 100%.

Pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan 318 berkas rekomendasi kebijakan, dengan rincian sebagai berikut :

1. 189 berkas rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
2. 11 berkas rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. 41 berkas rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral;
4. 77 dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman.

60% merupakan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagian besar terkait dengan dengan percepatan pembangunan kilang minyak, percepatan program kendaraan bermotor listrik (KBL), percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara aktif terus menerus melakukan monitoring, evaluasi dan *debottlenecking* bagi pembangunan yang menjadi program prioritas nasional.

Berikut perbandingan jumlah output dan outcome di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 :

Tabel 3.1.  
Perbandingan Jumlah Output dan Outcome di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Output	Outcome	Output	Outcome	Output	Outcome	Output	Outcome	Output	Outcome
Rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral (TUSI 1, 2, 3, dan 6)	48	48	136	136	242	242	195	48	189	189
Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral (TUSI 4)	14	14	44	44	19	19	27	7	11	11
Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral (TUSI 5)	33	33	100	100	73	73	43	24	41	41
Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi (TUSI FO)	13dok	13dok	28dok	28dok	28dok	28dok	96	16	77	77
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>361</b>	<b>95</b>	<b>318</b>	<b>318</b>

Penyelesaian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah memproses 2 Rancangan Peraturan Presiden dan telah ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Presiden, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Peraturan Presiden (Perpres) Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Telah Ditetapkan Presiden Tahun 2019**

No	No Perpres/Tentang	Tanggal Penetapan (Pengundangan)
1.	Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)	Ditetapkan : di Jakarta, 25 Januari 2019 Diundangkan : di Jakarta, 31 Januari 2019
2.	Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Ditetapkan : di Jakarta, 22 April 2019 Diundangkan : di Jakarta, 26 April 2019

Selain ketiga sasaran dan indikator tersebut diatas yang terkait dengan substansi (*core* bisnis utama) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral juga memiliki satu sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman” memiliki 2 (dua) Indikator Sasaran yakni:

- 1 Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan target nilai BB (78); dan
- 2 Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100%.

Sasaran ini yang merupakan sasaran yang hanya ada pada unit kerja yang memiliki Bidang Fasilitasi Operasional (FO) Kedeputian Substansi Bidang FO telah menyusun Laporan Kinerja Asdep Bidang Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 dan Laporan Kinerja Deputi Bidang

Kemaritiman Tahun 2018 dimana Tahun 2019 ini Laporan Kinerja tersebut telah direviu oleh Inspektorat dan mendapatkan nilai SAKIP adalah **78,06 (BB)**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya Kedeputian Bidang Kemaritiman telah memenuhi sebagian besar unsur pada komponen/sub komponen evaluasi. Hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja sampai dengan pelaporan kinerja.

Sedangkan untuk Pelaksanaan Program dan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan target 100% di tahun 2019 ini rata-rata realisasi anggaran unit kerja di Kedeputian Bidang Kemaritiman sebesar 98,48%.

Pelaksanaan Program dan Anggaran diantaranya adalah penyusunan RAB/POK dan KAK/ToR Tahun 2019 yang disusun sesuai pagu alokasi yang diberikan Tahun 2019. Penyampaian rencana penarikan dana dan rencana kegiatan/output bulan Tahun 2019. Penyampaian capaian output/IKK Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral setiap bulan dalam kurun waktu satu tahun sebagai bahan mengisi Emonev Bappenas (PP39) serta pelaksanaan pengelolaan anggaran (PPK, BPP dan SPK) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Kemaritiman yang terkait dengan penyerapan anggaran Tahun 2019.

Capaian kinerja tersebut sangat didukung dan dipengaruhi oleh upaya, komitmen dan semangat kerja yang dilakukan seluruh pejabat/pegawai Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewajibannya, antara lain dengan:

- a. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan K/L terkait;
- b. Mempedomani SOP yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan surat-surat yang ditangani;
- c. Melakukan *monitoring* secara berkala atas capaian kinerja yang telah dihasilkan setiap 3 (tiga) bulan;

- d. Mengembangkan Aplikasi untuk monitoring terkait batas waktu penyelesaian surat masuk berdasarkan SOP (*Warning System*);
- e. Meningkatkan kinerja ketatausahaan dalam pengarsipan dokumen, dengan mengintegrasikan *softcopy* arsip dengan pencatatan agenda, guna mendukung kinerja penyelesaian surat masuk.

Sedangkan untuk capaian pada tindak lanjut arahan Presiden, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah **menindaklanjuti arahan Presiden pada 29 Rapat Terbatas/Sidang Kabinet/Pertemuan Lainnya**, dengan uraian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3.**  
**Uraian Capaian Tindak Lanjut Arahan Presiden Di Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral s.d. Tahun 2019**

No.	Pertemuan	Tindak Lanjut
1.	RAPAT TERBATAS 01 Februari 2016 <b>Lanjutan Pembahasan Blok Masela</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputi Bidang Kemaritiman dengan memorandum nomor: M-215/Maritim/5/2016 tanggal 25 April 2016 kepada Seskab melaporkan Permohonan Lembaga Intelektual Maluku Barat Daya tentang Penetapan Lokasi Kilang Blok Masela;</li> <li>2. Sekretaris Kabinet dengan surat nomor: B-291/Seskab/Maritim/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 kepada Menteri ESDM menyampaikan Pembangunan Blok Masela di Darat;</li> <li>3. Deputi Bidang Kemaritiman dengan memo no: M-553/Maritim/11/2016 tanggal 9 November 2016 kepada Seskab menyampaikan naskah memo Seskab kepada Presiden untuk melaporkan surat Menko Bidang Kemaritiman dengan surat nomor: S-96/Menko/Maritim/X/2016 kepada Presiden tentang perkembangan Blok Masela.</li> <li>4. Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan rapat klarifikasi dan evaluasi proses penyusunan peraturan pelaksanaan PP 27/2017 pada tanggal 27 Maret 2017 dengan hasil: a. KPPIP perlu memfasilitasi KESDM dan Kemenkeu guna membahas pengaturan mengenai pertimbangan keekonomian proyek dalam pemberian intensif; b. Target penyelesaian peraturan pelaksanaan PP27/2017 oleh Kemenkeu selesai bulan April 2018; c. Pemberian intensif daerah mengacu pada mekanisme yang ada dalam UU 28/2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. Lokasi Proyek Masela agar dipastikan masuk dalam RZWP3K;</li> <li>5. Deputi Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat membahas peraturan pelaksanaan PP 27/2017 pada tanggal 13 April 2018, dengan kesepakatan rapat Kemenkeu akan merumuskan terkait insentif yang dapat diberikan</li> <li>6. 20 Juli 2018, hasil koordinasi dengan Kemenkeu,</li> </ol>



		Rancangan PMK masih dalam tahap finalisasi.
2.	RAPAT TERBATAS 20 Agustus 2016 <b>Percepatan Implementasi Poros Maritim</b>	Pembangunan dan pengembangan kilang minyak
3.	RAPAT TERBATAS 22 Desember 2016 <b>Hasil Kunjungan Presiden Ke India Dan Iran</b>	Pada bulan Agustus 2016 PT Pertamina dan National Iranian Oil Company telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan studi pendahuluan terhadap kedua lapangan minyak raksasa Iran tersebut.
4.	RAPAT TERBATAS 10 Januari 2017 <b>Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renegosiasi Kontrak antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia;</li> <li>2. Penandatanganan Head Of Agreement, Pemerintah Indonesia (PT Inalum) dengan PTFI.</li> </ol>
5.	RAPAT TERBATAS 13 Januari 2017 <b>Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera</b>	Integrasi penyaluran subsidi energi dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
6.	RAPAT TERBATAS 24 Januari 2017 <b>Harga Gas untuk Industri</b>	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
7.	RAPAT TERBATAS 16 Februari 2017 <b>Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatera Utara</b>	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
8.	RAPAT TERBATAS 16 Februari 2017 <b>Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur</b>	Penyaluran dan penyambungan gas untuk rumah tangga dan industri kecil.
9.	RAPAT TERBATAS 09 Maret 2017 <b>Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/ Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)</b>	Penyusunan RPerpres Penghapusan Penggunaan Merkuri Pada Kegiatan Pertambangan
10.	RAPAT TERBATAS 14 Maret 2017 <b>Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Jawa Timur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan kilang mini LNG dan stasiun LNG-LNCG di Pulau Jawa yang tercantum dalam daftar PSN di Perpres Nomor 3 Tahun 2016, telah dihapus dengan dikeluarkannya Perpres 58 Tahun 2017;</li> <li>2. Status terakhir sedang dalam proses pengkajian ulang untuk menjadi LNG Hub ship-to-ship.</li> </ol>

11.	RAPAT TERBATAS 22 Maret 2017 <b>Evaluasi Implementasi Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renegosiasi Kontrak antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia;</li> <li>2. Penandatanganan <i>Head Of Agreement</i>, Pemerintah Indonesia (PT Inalum) dengan PTFI;</li> <li>3. Upaya Renegosiasi Freeport dengan Pemerintah Indonesia.</li> </ol>
12.	RAPAT TERBATAS 30 Mei 2017 <b>Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun 2017</b>	Integrasi penyaluran subsidi energi dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
13.	RAPAT TERBATAS 31 Mei 2017 <b>Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Bengkulu</b>	Pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hulu Lais 2x55 Megawatt (MW)
14.	RAPAT TERBATAS 14 Juni 2017 <b>Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Bali</b>	PLTSa Suwung Bali menggunakan skema penugasan PT. PLN (Persero) sebagai pengembang PLTSa. Saat ini PT. PLN (Persero) bersama anak perusahaannya PT. Indonesia Power sedang melakukan seleksi mitra untuk menjadi partner dalam pembangunan PLTSa Suwung Bali. Diharapkan Oktober 2019 sudah ada mitra terpilih. Pemerintah Provinsi akan mengkoordinasikan supply sampah dan biaya layanan pengolahan sampah (Tipping Fee) kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
15.	RAPAT TERBATAS 19 Juli 2017 <b>Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Papua</b>	Pemanfaatan gas alam di Teluk Bintuni untuk keperluan masyarakat Provinsi Papua
16.	PERTEMUAN LAINNYA 23 Oktober 2017 <b>Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Emir Qatar</b>	Kerja sama antara Indonesia dengan Qatar dibidang minyak dan gas bumi (pembangunan kilang minyak)
17.	RAPAT TERBATAS 05 April 2018 <b>Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jenis BBM Premium di Wilayah Jawa, Madura, dan Bali melalui Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;</li> <li>2. Telah terbit Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.</li> </ol>
18.	RAPAT TERBATAS 20 Juli 2018 <b>Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel</b>	Pengujian lanjutan dampak B20 terhadap Nox dan partikulat yang akan dilakukan oleh GAIKINDO
19.	RAPAT TERBATAS 31 Juli 2018 <b>Strategi Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi BU BBM yang wajib melakukan pencampuran;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan BU BBM terkait.</li> </ol>

	<b>Memperkuat Cadangan Devisa</b>	
20.	RAPAT TERBATAS 29 November 2018 <b>Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia</b>	Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 17 Desember 2018, yang dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Irjen Kementerian LHK, serta wakil dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM.
21.	RAPAT TERBATAS 21 Desember 2018 <b>Persiapan Natal dan Tahun Baru</b>	Penyediaan pangan, Bahan Bakar Minyak, transportasi, keamanan, dan pelayanan kesehatan selama Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019
22.	RAPAT TERBATAS 14 Januari 2019 <b>Program Kendaraan Bermotor Listrik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya surat tanggapan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap surat Sekretaris Negara terkait penyampaian paraf sebagian pada naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<b>Battery Electric Vehicle</b>) untuk transportasi jalan.</li> <li>2. Kementerian Perindustrian akan melakukan rapat internal pembahasan tanggapan Kementerian ESDM yang jangka waktu penggunaan TKDN minimum.</li> </ol>
23.	RAPAT TERBATAS 23 Januari 2019 <b>RUU tentang Minyak dan Gas Bumi</b>	Presiden telah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR tanggal 29 Januari 2019 perihal penunjukan Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan Menkumham, selaku wakil Pemerintah untuk membahas RUU Migas.
24.	RAPAT TERBATAS 6 Maret 2019 <b>Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya surat tanggapan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap surat Sekretaris Negara terkait penyampaian paraf sebagian pada naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<b>Battery Electric Vehicle</b>) untuk transportasi jalan.</li> <li>2. Kementerian Perindustrian akan melakukan rapat internal pembahasan tanggapan Kementerian ESDM terkait jangka waktu penggunaan TKDN minimum.</li> </ol>
25.	RAPAT TERBATAS 18 April 2019 <b>Tindak Lanjut Kunjungan Presiden ke Arab Saudi</b>	Memperpanjang <b>Joint Venture Development Agreement (JVDA)</b> antara Indonesia dan Arab Saudi hingga bulan September 2019, dan bersepakat untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing menugaskan valuatornya untuk memilih valuator ketiga dan menerima hasilnya;</li> <li>2. Mengesahkan hasil valuasi pada September 2019, agar kerjasama kilang Cilacap segera dimulai.</li> </ol>
26.	RAPAT TERBATAS 22 April 2019 <b>Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020</b>	Tidak ada kenaikan harga BBM Subsidi sampai dengan bulan Juni 2019.
27.	RAPAT TERBATAS	Perkembangan Energi Terbarukan (s.d.semester I Tahun

	<p>8 Juli 2019 <b>Arahan Presiden dan Pemaparan Menteri PPN/Kepala Bappenas</b></p>	<p>2019) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 75 (tujuh puluh lima) kontrak Energi Baru dan Terbarukan telah ditandatangani sejak tahun 2017 s.d. Semester I 2019;</li> <li>2. Kontrak-kontrak tersebut terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 50 Kontrak PLTMH – Kapasitas 287,8 MW</li> <li>b. 6 Kontrak PLTS - Kapasitas 45 MW</li> <li>c. 6 Kontrak PLTBM (Bio Massa) Kapasitas 42,4 MW</li> <li>d. 6 Kontrak PLTBG (Bio Gas) Kapasitas 10,8 MW</li> <li>e. 5 Kontrak PLT Hidro Kapasitas 1.104 MW</li> <li>f. 1 Kontrak PLTPB (Panas Bumi) 86 MW</li> <li>g. 1 Kontrak PLTSa 5 MW;</li> </ol> </li> <li>3. Total kapasitas pembangkit yang telah memiliki kontrak hingga semester I tahun 2019 adalah sebesar 1.581 MW;</li> <li>4. Bauran energi primer pembangkit listrik EBT adalah sebesar 12,71%;</li> <li>5. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas terpasang pembangkit Panas Bumi adalah sebesar 1.948,3 MW</li> <li>b. Kapasitas terpasang pembangkit PLTS, PLTB, PLTM, PLTMH adalah sebesar 659,6 MW</li> <li>c. Kapasitas terpasang pembangkit PLT Bioenergi adalah sebesar 1.882,8 MW</li> </ol> </li> </ol>
<p>28</p>	<p>RAPAT TERBATAS 16 Juli 2019 <b>Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)</b></p>	<p>Per September 2019, Update pembangunan PLTSa di 5 Prov/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Surabaya: telah mendapatkan Legal Opinion dari Kejaksaan Agung melalui Surat No. B-133/A/Gph.1/09/2019 tanggal 30 September 2019 tanggal 30 September 2019. Intinya, keterlambatan pencapaian COD bukan keadaan force majeure tetapi dikategorikan sebagai hardship yaitu alasan pembenar, karena terlambatnya pencapaian COD berada diluar kekuasaan, sehingga PT SO tidak dikenai denda penalti, dan perlu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.</li> <li>2. Kota Solo: Pengembangan tahap pertama dengan kapasitas 5 MW tanpa BLPS. Tahap amandemen Perjanjian Kerja Sama antara Pemkot Surakarta dan PT Solo Citra MPP dan PJBL antara PLN dan PT Solo Citra MPP</li> <li>3. Prov. DKI Jakarta: PT Jakarta Solusi Lestari telah menyampaikan draft Perjanjian Jual Beli Listrik kepada PLN untuk direview</li> <li>4. Kota Bekasi: Telah dilakukan uji komisioning untuk pembangkit kapasitas 1,5 namun tidak menghasilkan listrik. PT Nusa Wijaya Abadi harus melengkapi fasilitas PLTSa 1,5 MW yang dipersyaratkan (seperti load bank). Pembangunan fokus pada PLTSa kapasitas besar 19 MW.</li> <li>5. Kota Denpasar (Sarbagita): PT Indonesia Power telah menyerahkan dokumen Studi Kelayakan kepada Pemkot Denpasar.</li> </ol>
<p>29.</p>	<p>RAAPAT TERBATAS 12 Agustus 2019 <b>Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel</b></p>	<p>Volume impor Solar pada bulan September 2019 sebesar 297.451 kiloliter, meningkat dibanding bulan sebelumnya yaitu sebesar 49.183,669 kiloliter.</p>

## B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, maupun solusi serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran indikator “yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman” dapat dikategorikan “sangat memuaskan” (mencapai 100%). Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 3.4.  
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100 %	Memuaskan
2.	85 % - < 100 %	Sangat Baik
3.	70 %- < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan manfaat yang cukup optimal dan efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.

- b. Munculnya isu-isu penting bidang energi dan sumber daya mineral yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik menjadi inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. **Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil penyelesaian rekomendasi kebijakan. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi yang berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Untuk arahan Presiden sudah dibantu oleh Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator namun belum optimal dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan.

2. **Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif**

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dalam aspek kuantitas, maupun kualitas, seperti: analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Dalam segi kuantitas, masih terdapatnya kekosongan pejabat, seperti

Asisten Deputi, maupun Analis di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan dalam segi kualitas, masih terdapatnya SDM yang perlu memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

### 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

Sedangkan untuk analisis kendala dan rekomendasi perbaikan per indikator kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja "**Rancangan rekomendasi atas rencana penyelenggaraan pemerintahan**" terdapat kendala, yaitu banyaknya rancangan rekomendasi yang harus dibuat, namun terkendala kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang menanganinya. Kendala ini dapat diatasi dengan menambah jumlah SDM dan mengirimkan SDM pada bidang diklat analisa dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

2. Pada indikator kinerja "**Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subsansi rancangan PUU**" terdapat kendala, yaitu belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga/instansi lain, sehingga mempengaruhi kurang optimalnya waktu dalam penyusunan rancangan rekomendasi izin prakarsa. Kendala ini dapat diatasi dengan membangun portal pengumpulan informasi untuk penyusunan rancangan rekomendasi izin prakarsa yang optimal.
3. Pada indikator kinerja "**Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil**" terdapat kendala, yaitu:
  - Kurang optimalnya pemakaian sistem pendukung pekerjaan seperti Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yaitu kurangnya kepatuhan K/L dalam menindaklanjuti arahan Presiden dan kendala yang dihadapi. Kendala ini dapat diatasi dengan memantau kepatuhan K/L dalam menggunakan SITAP, dan selalu melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan;
  - Sarana yang kurang mendukung seperti unit komputer yang lama prosesnya dalam menjalankan pekerjaan yang membutuhkan memori besar pada komputer, serta belum adanya fasilitas *software* berbayar untuk memudahkan pekerjaan. Kendala ini dapat diatasi dengan mengganti unit komputer dan penyediaan sarana *software* berbayar oleh Pusdatin.

### **C. GAMBARAN KINERJA ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2019**

Capaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan bentuk *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral guna mendukung kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Sekretaris Kabinet sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya, sesuai pengelompokan indikator kinerja kegiatan.



Tahun 2019 bidang energi dan sumber daya mineral menyumbangkan capaian sebesar 318 dokumen rancangan rekomendasi kebijakan. Beberapa diantaranya digambarkan dalam uraian berikut ini.

**C.1. Realisasi rancangan rekomendasi atas rencana penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman.**

**C.1.a). Perkembangan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri**

Dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan BBM nasional serta mengurangi ketergantungan impor BBM, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri melalui Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015.

Melalui penugasan kepada PT Pertamina, pemerintah menargetkan pembangunan 2 (dua) kilang minyak/*Grass Root Refinery* (GRR) yaitu GRR Tuban dan GRR Bontang dan peningkatan kapasitas 4 (empat) kilang minyak lama/*Refinery Development Masterplan* (RDMP) yaitu RDMP Dumai, RDMP Balongan, RDMP Cilacap, dan RDMP Balikpapan.

Dalam pelaksanaannya pembangunan kilang minyak tidak mudah dilakukan, mengingat kebutuhan biaya investasi yang cukup tinggi dengan pengembalian investasi yang cukup panjang, sulit untuk mencari *investor*. Beberapa permasalahan yang dialami dalam pembangunan dan pengembangan kilang minyak antara lain: perbedaan valuasi aset antara PT Pertamina dan Saudi Aramco dalam proyek RDMP Cilacap; ketidaksesuaian Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), AMDAL, dan adanya permasalahan dalam proses pengadaan lahan pada proyek pembangunan GRR Tuban.

Guna percepatannya Presiden kerap kali memberikan arahan dalam Rapat Terbatas yang intinya agar pembangunan kilang minyak segera terwujud, untuk itu kementerian/lembaga membantu PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan penugasan dalam membangun kilang minyak di dalam negeri. Namun, sampai dengan akhir periode Kabinet

Kerja belum ada satu pun kilang yang dibangun oleh PT Pertamina (Persero).

Untuk percepatan penyelesaian permasalahan-permasalahan di atas, dan dalam menjalankan amanat Inpres 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden. Atas dasar tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman beberapa kali menyelenggarakan kegiatan/rapat sebagai berikut:

1. Rapat Realisasi Kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi pada proyek RDMP Kilang Cilacap dengan mengundang kementerian/lembaga terkait dan PT Pertamina (Persero) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2019. Rapat ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden yang menyampaikan bahwa permasalahan perbedaan valuasi aset kilang pada proyek RDMP Cilacap agar dapat diselesaikan dan jika tidak ada kesepakatan maka diberikan opsi kerja sama di sektor lain. Hasil dari rapat bahwa PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan bentuk kerja sama lain dengan Saudi Aramco yaitu dengan menawarkan skema bisnis menjadi *tolling no-spin-off* atau *merchant no-spin-off*;
2. Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Pembangunan Kilang Minyak dengan mengundang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), yang diselenggarakan pada Kamis, 5 September 2019. Rapat tersebut dimaksudkan untuk memonitor progres pembangunan RDMP Balikpapan dan kesiapan Rencana Peresmian Proyek Langit Biru Cilacap;
3. Rapat Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak dan Proyek Petrokimia dengan mengundang kementerian/lembaga terkait, yang diselenggarakan pada Jumát, 6 Desember 2019. Rapat

menyepakati aksi-aksi yang perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga guna percepatan pembangunan/pengembangan kilang minyak dan proyek petrokimia;

Foto 3.1.  
Rapat Percepatan Pembangunan/Pengembangan Kilang Minyak dan Proyek Petrokimia, Kantor Sekretariat Kabinet



4. Rapat dan Peninjauan Lapangan Guna Dukungan Percepatan Pembangunan GRR Tuban dengan mengundang kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, yang diselenggarakan pada Selasa, 17 Desember 2019. Hasil dari kegiatan tersebut disepakatinya aksi-aksi yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait serta PT Pertamina (Persero) guna percepatan pembangunan *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban, antara lain percepatan revisi Perda RTRW Kabupaten Tuban.

Foto 3.2.  
Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Dukungan Percepatan Proyek GRR Tuban, Kec. Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur



### C.1.b). Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*)

Foto 3.3.

Deputi Bidang Kemaritiman menjadi salah satu narasumber Sosialisasi Perpres Nomor 9 Tahun 2019 di Padang, Sumatera Barat tanggal 24 April 2019



Foto. 3.4.

Bersama Narasumber dan Kepala Daerah regional Sumatera dalam acara sosialisasi Perpres 9 Tahun 2019 di Padang, Sumatera Barat tanggal 24 April 2019



Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*)/Perpres yang telah ditetapkan Presiden tanggal 25 Januari 2019, merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan *Geopark* melalui 3 (tiga) pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui kegiatan pariwisata. Hal ini sebagai upaya pencapaian target 20 juta wisatawan mancanegara dan menghasilkan angka devisa US\$7,5 miliar. Pengembangan *Geopark* melalui pengembangan destinasi

pariwisata diharapkan mampu berkontribusi 5% terhadap target kunjungan wisatawan mancanegara.

Dalam rangka memberikan pemahaman dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, maka Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyebarluasan Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), melalui kegiatan sosialisasi untuk regional Sumatera pada tanggal 24 April 2019 di Hotel Grand Mercure Padang, Sumatera Barat (sesuai ketentuan pasal 29 dan 34 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa sosialisasi peraturan dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun bekerjasama).

Acara sosialisasi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S. Psi, M.Sc., dan menghadirkan *Keynote Speech* Prof. Dr. H. Arief Rachman selaku Ketua Harian KNIU serta 5 narasumber yaitu, Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Lingkungan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas; Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya, Kementerian Pariwisata dan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet.

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Kabinet yang telah menyelenggarakan sosialisasi di Padang, Sumatera Barat. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 sangat dibutuhkan daerah yang memiliki potensi *Geopark* sebagai panduan dalam melakukan pengembangan *Geopark* khususnya di Sumatera Barat.

Sosialisasi dihadiri 220 peserta yang terdiri atas Pemerintah Daerah regional Sumatera, diantaranya 10 Bupati/Walikota (Bupati Merangin, Bupati Kerinci, Bupati Belitong Timur, Bupati Karo, Bupati Limah Puluh Kota, Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Besar, Bupati Sijunjung,

Bupati Natuna, dan Walikota Padang), Kepala Dinas ESDM Provinsi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat Kabinet.

Materi yang dibahas narasumber adalah, substansi Perpres secara keseluruhan, perkembangan *Geopark* Indonesia dan kelembagaan (Komite Nasional *Geopark* Indonesia), penetapan *Geoheritage* dan *Geopark* Nasional, pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata serta rencana aksi *Geopark* dan pendanaan. Sedangkan, beberapa topik yang dibahas pada sesi diskusi adalah terkait pendanaan kegiatan pengelolaan *Geopark* serta pengusulan penetapan *Geoheritage*, *Geopark* Nasional dan *UNESCO Global Geoparks (UGGp)*.

**Kesimpulan sosialisasi:**

- a. Pemerintah Daerah sangat antusias mengusulkan penetapan potensi *Geosite* untuk menjadi *Geopark* Nasional.
- b. Kementerian terkait akan segera menindaklanjuti amanat Perpres, untuk menerbitkan Permen yang dibutuhkan yaitu Permen ESDM terkait penetapan *Geoheritage* dan penetapan *Geopark* Nasional, Permen Bappenas terkait rencana aksi nasional pengembangan *Geopark*, Permen Pariwisata terkait tata kelola *Geopark* dan Permenko Kemaritiman terkait KNGI.
- c. Percepatan penetapan *Geoheritage* terhadap potensi *Geoheritage* yang telah diinventarisir Badan Geologi, untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengusulkan penetapan *Geopark* Nasional.
- d. Selanjutnya sosialisasi akan diselenggarakan oleh Kementerian ESDM bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk regional Jawa dan Kalimantan.

Perpres 9 Tahun 2019 juga mengamanatkan penyusunan pedoman teknis bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan *Geopark*. Dalam upaya mendorong percepatan penyelesaian

Permen ESDM, PPN/Bappenas dan Pariwisata yang akan digunakan sebagai pedoman teknis, Sekretariat Kabinet mengirimkan surat kepada Menteri ESDM, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Pariwisata guna dipercepat penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (surat Sekretaris Kabinet Nomor B- 0185/Seskab/Maritim/05/2019 tanggal 15 Mei 2019).

### C.1.c). Pengelolaan Pertambangan Emas di Gunung Botak

**Foto. 3.5.**  
Kondisi Gunung Botak, Kab. Buru, Provinsi Maluku yang sudah ditinggalkan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)



Kronologi permasalahan Gunung Botak:

- a. 7 Mei 2015: Arahan Presiden RI dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku, agar dilakukan Penutupan dan Penataan Lokasi PETI di Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
- b. 20 Oktober 2015: Gubernur Provinsi Maluku membentuk Tim Terpadu Penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.228 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku No.265 Tahun 2015, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, TNI, dan Akademisi Universitas Pattimura Ambon.
- c. 29 April 2016: Pemerintah Daerah Provinsi Maluku bekerja sama dengan PT Buana Pratama Sejahtera (PT BPS) untuk melakukan

penataan lokasi PETI di Gunung Botak berdasarkan Nota Kesepahaman No.540-23 Tahun 2016.

- d. 30 Mei 2016: Gubernur Provinsi Maluku membentuk Tim Kajian Penyelesaian Permasalahan PETI di Gunung Botak berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.225.a Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Kajian Penyelesaian Permasalahan di Gunung Botak dan Gogrea di Kabupaten Buru, yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung RI, dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
- e. 28 Juni 2016: Gubernur Provinsi Maluku menetapkan PT BPS sebagai pelaksana Kegiatan Penataan dan Pemulihan Lingkungan di Lokasi Bekas PETI di Gunung Botak berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.268 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemulihan Lingkungan Lokasi Bekas Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku No.382 Tahun 2016, dengan memberikan Izin Penataan dan Pemulihan Lingkungan pada areal yang telah ditetapkan Gubernur Provinsi Maluku.
- f. 23 November 2016: Gubernur Provinsi Maluku memberikan kewenangan kepada PT BPS untuk melaksanakan pemanfaatan dan pengolahan hasil penataan dan pemulihan lingkungan di lokasi bekas PETI berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No.383 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penataan dan Pemulihan Lingkungan Pada Lokasi Bekas Pertambangan Emas Tanpa Izin Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru Provinsi Maluku oleh PT BPS.
- g. 30 Desember 2016: Gubernur Provinsi Maluku memberikan IUPK Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Emas kepada PT BPS berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 467 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Emas kepada PT BPS dan memberikan IUPK Operasi Produksi Khusus untuk Penjualan Mineral Emas kepada PT BPS berdasarkan Keputusan Gubernur



Maluku No. 468 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Mineral Emas kepada PT BPS.

Pandangan Kementerian/Lembaga terkait permasalahan Gunung Botak:

- 1) Status hukum perizinan wilayah Gunung Botak adalah bebas dari segala kepemilikan, sehingga proses pemberian izin kepada PT Timah dan PT Antam menggunakan mekanisme WIUPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Tidak menggunakan mekanisme WPR sebab terdapat kesulitan apabila dilakukan negosiasi kepada PT yang memiliki izin di kawasan Gunung Botak.
- 2) Penugasan khusus kepada BUMN dalam hal ini dilakukan penunjukan oleh Pemprov Maluku dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, Oleh sebab itu perlu adanya payung hukum khusus terkait dengan percepatan penanganan dan pengelolaan kawasan pertambangan emas di gunung botak.
- 3) Kementerian LHK sedang fokus melakukan pemulihan lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten agar menjadi pola untuk diterapkan pada kasus Gunung Botak. KLHK juga telah melakukan kajian tentang penataan kawasan gunung botak berdasarkan aspek ekonomi, hukum, social dan lingkungan. KLHK merekomendasikan agar dibuat tanggul disekitar area pertambangan agar air yang mengalir dari hasil kegiatan pertambangan tidak meluas dan terkait dengan pemulihan lingkungan, KLHK menyampaikan bahwa perlu adanya analisis risiko terlebih dahulu tentang adanya lokasi yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat sebelum pemerintah (KLHK) melakukan kegiatan pemulihan lingkungan.
- 4) Situasi dan kondisi Gunung Botak saat ini dalam keadaan kosong dan bersih dari aktifitas PETI serta tenda-tenda bekas penambang Gunung Botak dijaga secara permanen/ tetap oleh Personil Polda Maluku dan Polres Pulau Buru. Polda Maluku mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera cari investor yang kompeten

untuk mengelola tambang emas Gunung Botak dengan profesional dengan memerhatikan kelestarian lingkungan.

- 5) PT ANTAM Sudah siap untuk ditugaskan dengan penunjukan khusus oleh pemerintah dan meminta data potensi keuntungan di Gunung Botak dan *Detail Engineering Design* (DED) dalam waktu dekat.

**Sehubungan permasalahan Gunung Botak tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi:**

- a. Mencari Pengelola/Investor/Badan Usaha yang berkompeten untuk mengelola kawasan Gunung Botak memerhatikan unsur lingkungan, keamanan, dan ekonomi masyarakat sekitar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan.
- b. Akan melanjutkan proses lelang WIUPK dengan Gubernur Maluku mengeluarkan rekomendasi untuk segera ditetapkannya WIUPK.
- c. Kementerian LHK akan melakukan kegiatan pemulihan lingkungan di Lebak, Banten agar menjadi pola contoh pada kasus Gunung Botak. (*pilot project*)
- d. Membentuk tim revisi regulasi hukum yang saling bertentangan apabila diterapkan untuk pengelolaan kasus Gunung Botak jangka panjang.

**C.1.d). Dukungan terhadap Peningkatan Keandalan Penyediaan Listrik Jawa-Bali**

Tanggal 4 Agustus 2019, terjadi pemadaman listrik total (*black out*) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Pemadaman listrik terjadi sejak pukul 11.45 WIB dan mengakibatkan semua kegiatan yang bergantung pada listrik menjadi lumpuh. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah layanan publik, transportasi, perbelanjaan hingga perbankan.

Akibat pemadaman listrik tersebut, Presiden mengadakan Inspeksi yang disertai Rapat Internal bersama jajaran Direksi PT. PLN (Persero) pada 5 Agustus 2019, dan memberikan arahan agar PT. PLN (Persero) dapat:

1. Menghitung dan mengkalkulasi potensi resiko yang muncul akibat padamnya listrik;
2. Secepatnya memperbaiki kerusakan infrastruktur pembangkit listrik dan memastikan agar semua wilayah yang sebelumnya terdampak listrik padam dapat menjadi normal; dan
3. Memastikan hal-hal menjadi penyebab peristiwa besar padamnya listrik di wilayah tidak terulang kembali;

Deputi Bidang Kemaritiman-Sekretariat Kabinet kemudian menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut dengan melakukan kunjungan ke kantor PT. PLN (Persero) bersama Kementerian BUMN pada tanggal 15 Agustus 2019, guna meminta penjelasan PT. PLN (Persero) mengenai tindak lanjut Arahan Presiden. Dalam kunjungan tersebut, PT. PLN (Persero) telah menyampaikan usulan perbaikan ke depan yaitu:

1. PT. PLN (Persero) agar dapat melakukan pemotongan pohon yang mendekati ruang Bebas Jaringan Transmisi (*Right of Way/RoW*).
2. Mengubah Peraturan Menteri ESDM menjadi Peraturan Presiden yang memberikan kemudahan PT. PLN (Persero) untuk melakukan pemotongan pohon tersebut.

Menindaklanjuti usulan perbaikan tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan pengkajian pengaturan RoW yang saat ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2015 jo. Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTAS untuk Penyaluran Tenaga Listrik. Permen ESDM tersebut kurang efektif dan perlu dilakukan integrasi aturan Permen ESDM ke dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, guna mengakomodir pemanfaatan ruang di bawah RoW transmisi selain tapak.

Pada tanggal 28 Agustus 2019, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan ruang di bawah RoW transmisi dan Jarak Bebas Minimum transmisi, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. PLN (Persero).

Dalam rapat tersebut, diperoleh beberapa kesepakatan yang telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: B.0333 tanggal 11 September 2019. Kesepakatan rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan kebijakan guna pengamanan transmisi *existing* dari tanaman, bangunan, dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu beroperasinya transmisi melalui penambahan pengaturan Peraturan Zonasi pada RoW dalam RTR Wilayah, untuk itu kiranya segera ditindaklanjuti:
  - a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
    - 1) merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
    - 2) dalam proses persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memastikan terdapat pengaturan tentang Peraturan Zonasi pada wilayah RoW khususnya bagi daerah yang dilintasi jaringan transmisi.
  - b. Menteri Dalam Negeri
    - 1) berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, yang wilayahnya dilintasi transmisi, agar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayahnya memuat pengaturan Peraturan Zonasi pada RoW, dan pada saat evaluasi Raperda

RTR Provinsi/Kabupaten/Kota memastikan pengaturan tersebut telah diakomodir.

- 2) menerbitkan surat edaran atau menghimbau Kepala Daerah agar melakukan edukasi kepada masyarakat yang tinggal dan/atau memiliki lahan di wilayah RoW agar turut berpartisipasi dalam pengamanan transmisi, sebelum Peraturan Zonasi ditetapkan dalam RTR Wilayah ataupun RTR Kawasan Strategis Nasional.
- c. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 1) mengkaji pemberian insentif dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) kepada pemilik lahan pada RoW, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan transmisi.
  - 2) apabila terdapat bangunan, tanaman dan/atau bentuk fisik lainnya yang berpotensi mengganggu beroperasinya transmisi, maka perlu dikaji Peraturan Perundang-undangan:
    - a) yang dapat menugaskan PT.PLN (Persero) untuk memberikan kompensasi pada pemilik lahan RoW sebelum ditetapkan RTRW yang mengakomodir Peraturan Zonasi dalam Perda RTRW;
    - b) terkait pemberian kompensasi kepada pemilik lahan RoW transmisi *existing* oleh PT. PLN (Persero) selaku pemegang IUPTL, setelah ditetapkannya Perda RTRW (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang telah memuat Peraturan Zonasi RoW.
- d. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Kepolisian Negara RI dan Pemerintah Daerah secara terus menerus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Zonasi pada RoW dimaksud.
2. Diperlukan dukungan guna percepatan pembangunan jaringan transmisi

500 kV dari Tanjung Jati-Cibatu Baru sepanjang 537 km sebagai *back-up* transmisi *existing*, untuk itu kiranya:

- a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Menteri Dalam Negeri membantu penyelesaian masalah pertanahan pembangunan transmisi (antara lain untuk pembangunan tapak *tower* dan pemanfaatan tidak langsung untuk RoW).
- b. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan (c.q Panglima TNI) dan memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing.

Berkaitan dengan surat Sekretaris Kabinet nomor B.0333 tanggal 11 September 2019 tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti dengan menyampaikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Oktober 2019 kepada Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia agar melakukan edukasi dan pengamanan ruang di bawah RoW Jaringan Transmisi Tenaga listrik melalui pengaturan pemanfaatan ruang di bawah RoW dalam kerangka penataan ruang di daerah masing-masing.

Dikarenakan belum terdapat tindak lanjut dari kementerian/lembaga lain, Deputi Bidang Kemaritiman kembali menyelenggarakan rapat pada tanggal 25 November 2019 guna meminta klarifikasi terhadap kementerian/lembaga terkait tindak lanjut kesepakatan rapat tanggal 28 Agustus 2019. Didalam rapat diperoleh informasi bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota telah mengakomodir kebutuhan sektor untuk ketentuan pemanfaatan ruang pada zona yang dilewati sistem jaringan sarana prasarana ketenagalistrikan. Selain itu, masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong pengamanan ruang di bawah RoW jaringan transmisi tenaga listrik. Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kesepakatan rapat tersebut melalui surat Nomor B-1016 tanggal 28 November 2019.

Kemudian, PT.PLN (Persero) menindaklanjuti dengan menyampaikan daftar usulan sarana prasarana ketenagalistrikan sebagai Objek Vital Nasional kepada Kementerian ESDM melalui surat nomor 1734/MNJ.02.02/010000/2019 tanggal 23 Desember 2019.

#### **C.1.e). Implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Thorium**

Kepala Perwakilan *Thorcon International Pte. Ltd* dengan surat Nomor: S-010819/ThorConIndonesia/8/2019 tanggal 5 Agustus 2019 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan audiensi. Inti surat adalah *ThorCon International Pte. Ltd.* adalah berniat mendorong implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) dengan mengajukan proposal untuk menjadikan PLTT sebagai Program Nasional.

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan surat Nomor: R-139/Sesjen/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 kepada Presiden juga menyampaikan kajian Optimalisasi Pemanfaatan Energi Thorium Guna Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. Inti surat Sekjen Wantannas adalah: *pertama*, Mengoptimalkan pemanfaatan energi Thorium dalam mengatasi proyeksi kebutuhan energi nasional yang meningkat di masa datang guna mengurangi dampak kerusakan terhadap tatanan air dan kualitas lingkungan hidup, sekaligus agar ketahanan energi nasional terjaga dengan baik. Selain itu, Indonesia memiliki potensi kandungan thorium 210.000-270.000 ton di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Dan *kedua*, Thorium tergolong nuklir ramah lingkungan sebagai salah satu sumber energi alternatif yang mampu menghidupi energi Indonesia sampai dengan lebih dari 1000 tahun.

Menindaklanjuti kedua surat tersebut, Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor: B-0313/Seskab/Maritim/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan agar hal tersebut dikaji lebih lanjut dan kiranya dapat menerima audiensi *Thorcon International Pte.Ltd* jika diperlukan.

Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-0313/Seskab/Maritim/9/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, Kepala

P3Tek KEBTKE Kementerian ESDM pada tanggal 17 September 2019 telah menyelenggarakan Rapat Pemaparan Laporan Akhir Kajian PLTT yang dihadiri Kemenko Maritim, Kemenko Ekon, Bappenas, BATAN, BAPETEN, Wantannas, PT PLN, PT PAL, dan Guru Besar FMIPA ITB serta Sekretariat Kabinet. Rapat menyepakati Kementerian ESDM kiranya menyampaikan rencana pembangunan PLTT kepada Bappenas guna dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024 untuk dijadikan proyek PSN atau jika memungkinkan kiranya dapat diterbitkan Perpres tentang Percepatan Pembangunan PLTT. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua DEN telah menerima audiensi *ThorCon International, Pte, Ltd.* tanggal 12 November 2019 yang menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia butuh PLTN dan telah disampaikan kepada DPR pada Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM tanggal 27 November 2019.

Kedeputian Bidang Kemaritiman juga aktif mengikuti isu terkait thorium di antaranya adalah menghadiri undangan Kepala Balitbang Kementerian Pertahanan menyampaikan permohonan sebagai penanggung dalam penyelenggaraan Forkom Litbang ke-30 TA 2019 dengan tema "Pemanfaatan Thorium sebagai alternatif Sumber Energi untuk Kepentingan Pertahanan Negara" tanggal 4 Desember 2019. Hasil dalam Forkom Litbang ke-30 TA 2019 tersebut adalah Balitbang Kemhan berupaya untuk mencari terobosan inovasi Teknologi yang tepat terhadap pengembangan Thorium dengan tujuan untuk memperoleh masukan yang strategis terkait dengan sumber energi alternatif dimasa mendatang mengingat bahan bakar energi yang bersumber dari fosil semakin lama semakin langka dan cenderung habis.



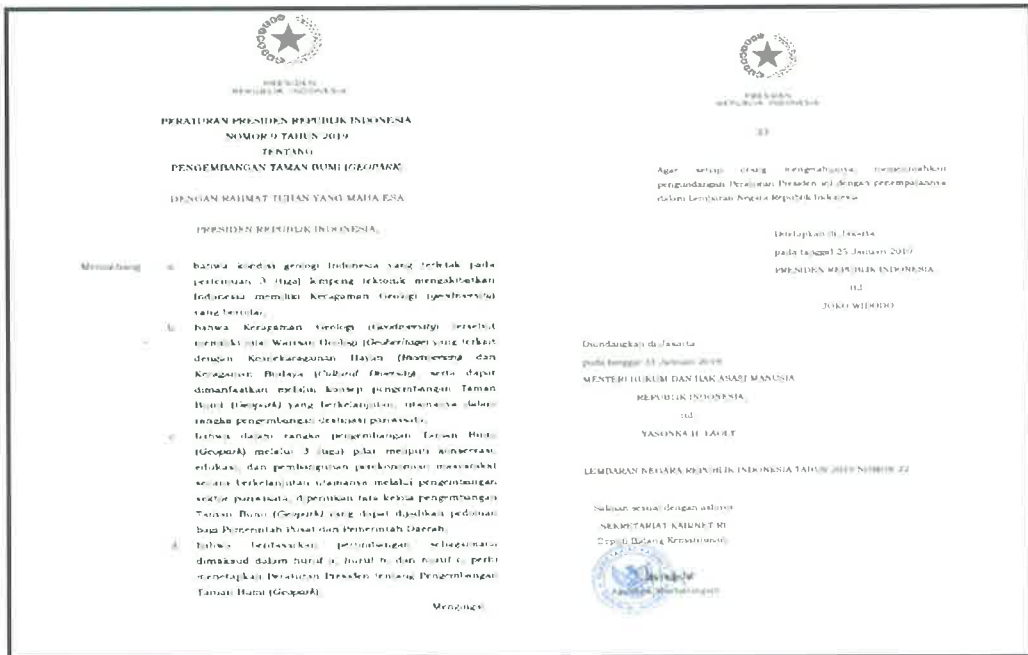
Foto. 3.6.  
 Forkom Litbang ke-30 TA 2019 dengan tema “Pemanfaatan Thorium sebagai alternatif Sumber Energi untuk Kepentingan Pertahanan Negara” tanggal 4 Desember 2019 di Jakarta



**C.2. Rancangan Rekomendasi kebijakan persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan Substansi Rancangan PUU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

**C.2.a) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)**

Gambar. 3.4.  
 Perpres 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) di otentifikasi oleh Deputy Bidang Kemaritiman



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyampaikan permohonan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet untuk

menetapkan RPerpres tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) melalui surat nomor B-1950/MENKO/MARITIM/ UM.001/IX/2018 tanggal 19 September 2018.

Menindaklanjuti pengajuan RPerpres tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat koordinasi di Sekretariat Kabinet pada tanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 1 November 2018 dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PPN/Bapennas dan Badan Ekonomi Kreatif dengan kesepakatan menyetujui substansi dan konsep RPerpres.

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat, Sekretaris Kabinet meminta paraf persetujuan RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Pariwisata (surat Seskab Nomor B-545/Seskab/Maritim/11/2018 tanggal 8 November 2019). Setelah mendapatkan paraf persetujuan keempat menteri, selanjutnya Sekretaris Kabinet mengajukan permohonan penetapan RPerpres kepada Presiden (Memorandum Nomor M-1368 Tanggal 29 November 2018) dan pada tanggal 25 Januari 2019 Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 31 Januari 2019 (surat Deputi Bidang Kemaritiman kepada Menteri Hukum HAM nomor B-82/Maritim/01/2019 tanggal 31 Januari 2019).

Tahap selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan otentifikasi Perpres 9 Tahun 2019 dan mendistribusikan kepada 21 Kementerian/Lembaga, 14 Gubernur dan 19 Pengelola *Geopark* (surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B-112/Maritim/02/2019 tanggal 11 Februari 2019).

**C.2.b) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Rperpres RAN-PPM)**

**Gambar. 3.5.**  
**Perpres 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Rperpres RAN-PPM) di otentifikasi oleh Deputy Bidang Kemaritiman**



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RPerpres RAN-PPM) melalui surat nomor: S.268/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2018 tanggal 9 Agustus 2018.

RPerpres diajukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017 dan pelaksanaan komitmen Pemerintah pada UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata, sebagai upaya pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri yang diprioritaskan pada bidang pertambangan emas skala kecil, energi, kesehatan, dan manufaktur.

RPerpres telah mendapatkan paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan dan Menteri Perindustrian. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden, selanjutnya RPerpres Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan

Penghapusan Merkuri diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 26 April 2019.

Tahap selanjutnya, Deputi Bidang Kemaritiman melakukan otentifikasi Perpres 21 Tahun 2019 dan mendistribusikan kepada 24 Kementerian/Lembaga, Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku (surat Deputi Bidang Kemaritiman Nomor B-335/Maritim/05/2019 tanggal 2 Mei 2019).

### **C.2.c) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan**

Menteri ESDM kepada Presiden melalui surat tanggal 19 Juni 2017 mengusulkan pelaksanaan program energi bersih melalui pemanfaatan jenis dan teknologi energi bersih untuk kegiatan transportasi jalan melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Program energi bersih ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mewujudkan kota dengan energi bersih.

Sekretariat Kabinet kemudian menindaklanjuti usulan Kementerian ESDM tersebut dengan menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 6 Juli 2017 yang menyepakati penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagai payung hukum pelaksanaan program pengembangan moda transportasi dengan energi listrik dan melaporkan hasilnya segera kepada Presiden.

Penyusunan RPerpres diperlukan sebagai pedoman dalam pengimplementasian program pengembangan moda transportasi dengan energi listrik tersebut, khususnya untuk mempermudah koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pemberian dukungan dan kemudahan antara lain meliputi dukungan fiskal berupa insentif yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, kemudahan dalam hal perizinan dan pendaftaran/registrasi kendaraan.

Dalam perjalanan penyusunannya, RPerpres mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak sehingga proses penyusunannya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Pada tanggal 14 Januari 2019, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas membahas Program Kendaraan Bermotor Listrik dan memberikan arahan:

1. Peraturan Presiden merupakan hal yang dibutuhkan saat ini untuk pengembangan kendaraan bermotor listrik;
2. Peraturan Presiden diperlukan untuk menyatukan semua kementerian/lembaga, sehingga tidak bekerja secara sendiri-sendiri; dan
3. Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pimpinan k/l terkait agar memperhatikan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet terus terlibat aktif melakukan pembahasan substansi RPerpres baik dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun di kementerian/lembaga terkait guna mendapatkan pengaturan kebijakan yang tepat mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, terakhir pada tanggal 2 Mei 2019 di Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian akhirnya, pada saat Presiden mengadakan Rapat secara internal dengan Menteri terkait percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan pada tanggal 8 Agustus 2019, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan yang pada intinya mengatur penggunaan KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan, melalui:

- a. Percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri;
- b. Pemberian insentif;
- c. Penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai;
- d. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai;
- e. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

### **C.3. Rancangan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **C.3.a). Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota**

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada tanggal 12 April 2018. Dalam pelaksanaan Perpres dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman mewakili Sekretariat Kabinet menjadi anggota Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa. Selama ini aktif dalam rapat koordinasi dan turut memantau penyelesaian permasalahan pembangunan PLTSa di 12 Provinsi/Kota.

Secara garis besar Perpres Nomor 35 Tahun 2018 mengatur tentang:

- a. Penunjukan 12 Kota menjadi lokasi percepatan pembangunan PLTSa yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Manado, dan Kota Makassar;
- b. Dalam melakukan pembangunan PLTSa, Pemerintah Provinsi/Kota tersebut dapat menugaskan badan usaha milik daerah atau melakukan kompetisi badan usaha;
- c. Menteri ESDM menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pengembang PLTSa;
- d. Sumber pendanaan pembangunan PLTSa berasal dari APBD, dan dapat didukung oleh APBN, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan biaya pengolahan sampah kepada Pemerintah Daerah dengan besaran paling tinggi Rp 500.000,- per ton sampah;
- f. Menteri/kepala lembaga, dan Gubernur terkait melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;

- g. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa (Tim Koordinasi) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua serta menteri/pimpinan lembaga terkait sebagai anggota.

Namun dalam perjalanannya, masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaan pembangunan PLTSa antara lain:

- a. Lambatnya penerbitan Surat Penugasan pembelian listrik oleh Menteri ESDM.
- b. Belum tersedianya pendanaan proyek PLTSa.
- c. Lambatnya proses Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN (Persero) dan pengembang PLTSa.
- d. Belum adanya regulasi mengenai Biaya Layanan Pengolahan Sampah (*Tipping Fee*).
- e. Lambatnya penentuan skema pelaksanaan proyek.

Pada tanggal 16 Juli 2019, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas terkait pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa. Dalam Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi Arahan kepada Presiden untuk mengatasi kendala pelaksanaan PLTSa tersebut antara lain perlunya percepatan proses penerbitan Surat Penugasan pembelian listrik oleh Menteri ESDM antara lain untuk PLTSa Surabaya dan PLTSa Palembang, perlunya koordinasi oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memfasilitasi alternatif pendanaan PLTSa di luar penggunaan APBN/APBD, perlunya pengkajian besaran insentif dan tarif listrik oleh Kementerian ESDM, dan lain sebagainya.

Foto. 3.7.  
Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan untuk Percepatan Pembangunan PLTSa Kota Surabaya di TPA Benowo tanggal 15 November 2019



Hingga Desember Tahun 2019, pembangunan PLTSa di beberapa Provinsi/Kota telah mengalami kemajuan pesat, antara lain:

- a. Kota Surabaya dan Kota Surakarta telah mendapatkan persetujuan pembelian listrik oleh PT PLN (Persero) dari Menteri ESDM, dan saat ini sedang tahap konstruksi;  
PLTSa Kota Surabaya ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada 16 Maret 2020 dengan progres konstruksi mencapai 92%.
- b. Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Jakarta sudah memiliki mitra investor;
- c. Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Bandung/Regional Jawa Barat sedang proses Lelang Calon Investor;
- d. Kota Denpasar (Sarbagita) membangun PLTSa dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- e. Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Manado sedang dalam tahap Penyusunan dokumen *Pra-Feasibility Study*.

#### D. REALISASI ANGGARAN

kuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan



kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*outcome*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **D.1. Akuntabilitas Dukungan Anggaran**

Guna mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatannya dengan dukungan anggaran untuk Tahun 2019 sebesar **Rp. 2.750.000.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dana sejumlah **Rp. 2.750.000.000,-** untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **Rp. 1.490.707.000,-** dan untuk sasaran 2 sebesar **Rp. 1.259.743.000,-** .

Total realisasi anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan capaian kinerjanya, dengan jumlah penyerapan anggaran sebesar **Rp. 2.700.779.402,-** (Dua Milyar Tujuh Tujuh Puluh Tujuh Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) atau **98,21%**. Untuk penyerapan anggaran sasaran 1 sebesar **Rp. 1.488.314.384,-** dan penyerapan anggaran sasaran 2 sebesar **Rp. 1.198.891.183,-**. dapat diuraikan akuntabilitasnya sebagaimana uraian berikut

Tabel 3.5.  
Realisasi Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral  
Tahun 2019

Program/Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>SASARAN 1: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			
Penyusunan Rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral	1.406.883.000,-	1.404.490.784,-	99,83
Penyusunan Rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral	80.104.000,-	80.103.600,-	99,99
Penyusunan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral	3.720.000,-	3.720.000,-	100
<b>SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN</b>			
Penyusunan Dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepu- tan Bidang Kemaritiman	1.259.743.000,-	1.198.891.183,-	96.25
<b>TOTAL</b>	<b>2.750.000.000,-</b>	<b>2.700.779.402</b>	<b>98,21</b>

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar **98,21%** merupakan realisasi anggaran yang sangat baik dengan hanya sisa anggaran sebesar Rp. **Rp. 49.220.598,-**.

## D.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

### Penghematan Dana dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghematan Dana} = \text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}$$

Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar Rp. **2.750.000.000,-** - Rp. **2.700.779.402,-** sehingga sisa anggaran (penghematan) sebesar Rp. **49.220.598,-**. Persentase penghematan anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Penghematan Dana} = \frac{\text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Dana Tersedia}} \times 100\%$$

Persentase penghematan, yaitu  $\frac{\text{Rp. } 49.220.598,-}{\text{Rp. } 2.750.000.000,-} \times 100\% = 1,8\%$

Target *output* yang telah realisasikan pada Tahun 2019 adalah 318 rancangan rekomendasi kebijakan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp **2.700.779.402,- (98,21%)** dari pagu anggaran sebesar Rp. **2.750.000.000,-**. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp. **49.220.598,-** atau sebesar **1,8%**.

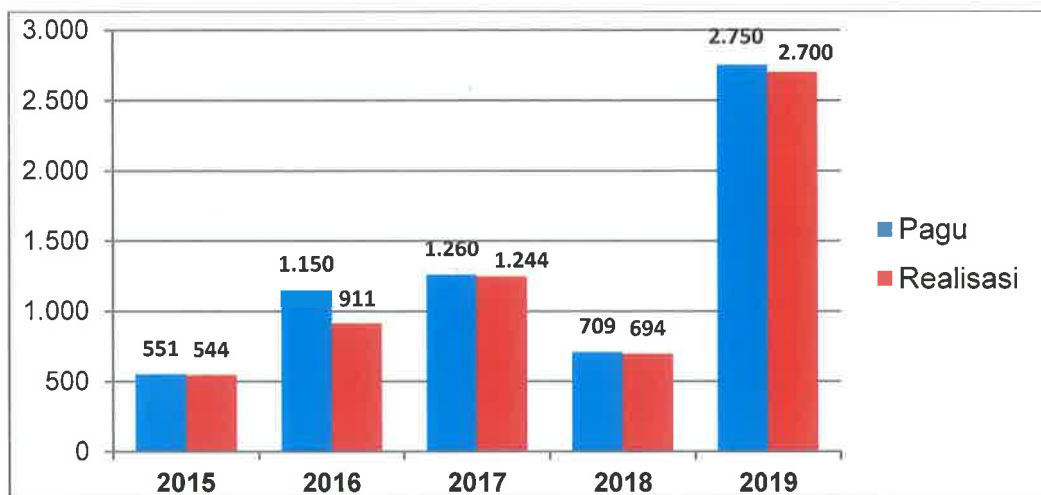
Tabel 3.6.  
Perbandingan Anggaran dan Capaian *Output* Tahun 2018 dan 2019

No.	Pagu Anggaran – Penyerapan Anggaran	Tahun 2018	Tahun 2019
	(1)	(2)	(3)
1.	Pagu Anggaran	709.200.000	2.750.000.000
2.	Realisasi Penyerapan	694.240.379	2.700.779.402
3.	Persentase Penyerapan	97,89 %	98,21 %
4.	Capaian <i>Output</i>	361	318

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan anggaran yang sangat besar dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ada kenaikan pada pagu anggaran tahun 2019 yang sebelumnya sebesar Rp. **709.200.000,-** menjadi Rp. **2.750.000.000,-**

Gambar. 3.6.

Perbandingan Persentase dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019



Tabel 3.7.  
Persentase Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang ESDM, dan 2. Terwujudnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman	Rp. 2.750.000.000,-	Rp. 2.700.779.402,-	98,21%	100%

Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Pencapaian kinerja dari aspek program dan kegiatan dilakukan efisien apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Melihat gambar di atas, persentase realisasi anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lebih kecil anggaran yang ditargetkan dan lebih kecil dari persentase capaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sudah efisien.

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Pada Tahun 2019 capaian kinerja Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya dengan rata-rata pencapaian masuk kategori “Memuaskan” (100%). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tugas sehari-hari.

Selama tahun 2019 Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah menghasilkan *ouput* rekomendasi sebanyak 318 berkas rekomendasi yang berkualitas dan memenuhi target nilai **SAKIP 78,06 (BB)** untuk penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Dan 77 dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. Secara total realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2019 mencapai **Rp. 2.700.779.402,-** atau **98,21%** dari total pagu anggaran Tahun 2019 sebesar **Rp. 2.750.000.000,-** ada penghematan sebesar **Rp. 49.220.598,-** atau sebesar **1,8%**.

LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2019 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang, agar lebih optimal lagi, dan sebagai bahan penyempurnaan di perencanaan kinerja, dan pengelolaan dokumen sebagai bahan utama penyusunan LKj.

## **B. REKOMENDASI**

Sehubungan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan upaya ini Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berharap dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait dapat lebih baik.

Agar dapat mempertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, maka terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama bidang substansi pelaksanaan tugas dan fungsi, rapat koordinasi, seminar, *workshop*, FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia termasuk dukungan anggaran untuk meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.
3. SITAP untuk dapat lebih mudah menindaklanjuti dan memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden.
4. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di public, sehingga dapat segera direspon melalui pendekatan yang lebih proaktif.



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : a.n. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman

  
Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, Januari 2019  
Pihak Pertama,  
a.n. Asisten Deputi Bidang Energi dan  
Sumber Daya Mineral

  
Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subetansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman	Persentase dokumen pelaksanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku di Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase dokumen pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
<b>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.1.672.755.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.212.373.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.97.476.000,-
4. Pengekoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputan Bidang Kemaritiman	Rp.767.396.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.2.750.000.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Kemaritiman

  
 Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, Januari 2019  
Pihak Pertama,  
a.n. Asisten Deputi Bidang Energi dan  
Sumber Daya Mineral

  
 Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

## LAMPIRAN

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2019

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/ Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
<b>JANUARI 2019</b>											
1	Program: Kemaritiman Yang Siap Diluncurkan dan Menarik Bagi Masyarakat	Sekretaris Kabinet	1.(2019)	02/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Naik 02/01/2019	M-1	02/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	Naik ke Seskab
2	Penyampaian Data Capaian Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan Desember 2018	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan		02/01/2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	OUTPUT FO	-
3	Bahan rapat penyelesaian permasalahan pengedaran tanah untuk pembangunan kilang minyak tuban Kamis 3 Januari 2019 pukul 10.00 wib di rupa lantai 2	Deputi Bidang Kemaritiman	2.(2019)	02/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan
4	Undangan Rapat Koordinasi Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden dengan Kementerian Koordinator	4 Sesmenko	1.1 (2019)	03/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	hari dijadwalkan kembali 03/01/2019, kirim 04/01/2019	B-5/Maritim/01/2019	04/01/2019	4 Sesmenko	OUTCOME FO	Surat Deputi ke Sesmenko
5	Penyampaian Bahan dan Briefing Sheet Audiensi Chevron Dengan Sekretaris Kabinet	Sekretaris Kabinet	3.(2019)	02/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kirimkan 07/01/2019	M-7	04/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
6	Bahan Sidang Kabinet Paripurna Program dan Kegiatan Tahun 2019 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris Kabinet	4.(2019)	07/01/2019	Asdep Bidang Kepariwisata, Riset Teknologi dan Lingkungan Maritim	naik 07/01/2019	M-8	07/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	Naik ke Seskab
7	Penyampaian Kuisioner Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Tahun 2018	Sesmenkomar, Sesmenkoekon, SesjenKP, SesjenESDM, Sesjenhub, Sespar	5.(2019)	09/01/2019	Asdep 1.3-4	-	B-11/Maritim/1/2019	08 Januari 2019	Sesmenkomar, Sesmenkoekon, SesjenKP, SesjenESDM, Sesjenhub, Sespar	OUTCOME FO	Surat Deputi ke Sesmenkomar, Sesmenkoekon, SesjenKP, SesjenESDM, Sesjenhub, Sespar
8	Perkembangan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Kilang Minyak Tuban	Sekretaris Kabinet	8.(2019)	09/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 09/01/2019	M-11	09/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
9	Undangan Narasumber Forum FGD pada Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)	BPKP	9.(2019)	10/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Ok, dikirim, diikuti dengan WA biar cepat 10/01/2019	B-13/Maritim/01/2019	10/01/2019	BPKP	OUTCOME FO	Mendapat bahan dari BPKP untuk menindaklanjuti SITAP
10	Penyampaian Survei Kepuasan Pengguna Sistem Informasi	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	10.(2019)	10/01/2019	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	-	-	-	-	OUTPUT FO	-

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
11	Penyampaian Data Capaian Kinerja Guna Pengisian Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kemenkeu Tahun Anggaran 2018	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	11.(2019)	10/01/2019	Pt. Karo Renkeu	-	-	-	-	OUTPUT FO	-
12	Usulan Pelaksanaan Rapat Terbatas membahas rancangan undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi pada rentang waktu 21 - 24 Januari 2019	Sekretaris Kabinet	14.(2019)	10/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 11/01/2019	M-15	11/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
13	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTsa di Provinsi Bali	Deputi Bidang Kemaritiman	15.(2019)	10/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Pak Daniil tolong disiapkan laporan secara menyeluruh. Progres PLTsa Perpres 35/2018 kendala yg paling utama : - pembelian harga listrik o/ PLN - lahan - keberatan pembiayaan o/ Pemda - perhitungan bisnis penyedia/PP PLTsa terhadap pengaturannya 11/01/19	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
14	Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana	Deputi Bidang PMK	17.(2019)	14/01/2019	Asdep Bidang Keperawatan, Ristek dan Lingkungan Maritim	naik 14/01/2019	M-18	14/01/2019	Deputi Bidang PMK	OUTCOME IKK 3	Disampaikan ke Kedeputan lain sebagai bahan Ratas
15	Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan	Sekretaris Kabinet	18.(2019)	14/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 14/01/2019	M-19	14/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	Naik ke Seskab
16	Masukan terhadap Penyusunan Work Plan (Rencana Kerja) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2019	Kepala Biro AKRBB	19.(2019)	16/01/2019	Karo AKRBB	-	-	-	-	OUTPUT FO	-
17	Penyampaian Hasil Rapat Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	asdep 1, 3, 4	28.(2019)	16/01/2019	asdep 1, 3, 4	-	-	-	-	OUTPUT FO	-
18	Laporan Rapat Koordinasi Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden dengan Kementerian Koordinator	Wakil Sekretaris Kabinet	29.(2019)	17/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	sesuai pembicaraan 22/01/2019	M-37	24/01/2019	Wakil Sekretaris Kabinet	OUTCOME FO	Naik ke Waseskab
19	Undangan Rapat Pengembangan SITAP dengan PT Telkom. Jumat, 18 Januari 2019. Pukul 09.00 Wib. Di Lt.1 (Konsep Surat Deputi ke Asdep SITAP, BPKP, Telkom)	Asdep SITAP, BPKP, PT Telkom	31.(2019)	17/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kiriman 17/01/2019	M-28	17/01/2019	Asdep SITAP, BPKP, PT Telkom	OUTCOME FO	Surat Deputi ke Asdep SITAP, BPKP dan Telkom
20	Laporan Menghadiri Rapat Awal Pembahasan Draft Permenko tentang Komite Nasional Geopark Indonesia	Deputi Bidang Kemaritiman	32.(2019)	17/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	di ikuti perkembangannya, 17/01/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
21	Laporan Hasil Menghadiri Rapat Pemaparan Pengembangan Panas Bumi di Gunung Kaldera Toba	Deputi Bidang Kemaritiman	33.(2019)	17/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	di ikuti perkembangannya, 17/01/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
22	Laporan Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2019	Sekretaris Kabinet	34.(2019)	35.(2019)	Deputi Bidang Kemaritiman	naik, 18/01/2019	M-33	18/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
23	Penyampaian Bahan dan Undangan Rapat Membahas Perkembangan Kegiatan Pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Blok Rokan Riau	Deputi Bidang Kemaritiman	35 (2019)	17/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan
24	Laporan Perkembangan PLTT	Deputi Bidang Kemaritiman	36.(2019)	17/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
25	Penyampaian Undangan Rapat Membahas Perkembangan Kegiatan Pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Blok Rokan Riau	Dirjen Migas ESDM, Dirjen LHK, Deputi Perencanaan SKK Migas, Deputi Operasi SKK Migas	38.(2019)	18/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	diperbaiki catatan saya, 18/01/2019	B-40/Maritim/1/2019	21 Januari 2019	Dirjen Migas ESDM, Dirjen LHK, Deputi Perencanaan SKK Migas, Deputi Operasi SKK Migas	OUTCOME IKK 1	Surat Deputi ke Dirjen Migas ESDM, Dirjen LHK, Deputi Perencanaan SKK Migas, Deputi Operasi SKK Migas sehingga saat rapat mendapat bahan paparan dari K/L
26	Penyampaian bahan rapat koordinasi percepatan pembangunan fasilitas penolah sampah yang menghasilkan listrik berbasis teknologi ramah lingkungan ball	Deputi Bidang Kemaritiman	41.(2019)	18/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan
27	Penyampaian Data Politik Kebijakan Sektor ESDM Tahun 2019	Deputi Polhukam	42.(2019)	18/01/2019	Asdep Bidang Kepanawisataan, Ristek dan Lingkungan Maritim	dikirim: Disortir berkas. 21/01/19	M-34	21/01/2019	Deputi Polhukam	OUTCOME IKK 3	Diteruskan kepada Deputi Polhukam
28	Laporan Rapat Pembahasan Penyusunan Tanggapan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi	Deputi Bidang Kemaritiman	42.1 (2019)	18/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	siapkan memo ke Seskab tekankan kpd hal2 yg penting dan resiko implementasi contoh : PI 15%. Berapa investasi hulu migas saat ini dan perkiraan kedepan nantinya APBN harus siap, bagaimana nasib BUMN eksisting (pertamina) apakah tetap sbg ... K3S atau cillebur, kesiapan SDM dst. 21/01/19	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/ Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
29	Briefing Sheet Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW	-	43.(2019)	22/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	-	-	22/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan
30	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas Membahas Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris Kabinet	45.(2019)	22/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	naik 23/01/2019	M-35	23/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	Naik ke Seskab
31	Penyampaian Bahan Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional Ke-5	-	46.(2019)	22/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	-	-	22/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	OUTCOME IKK 3	Dimanfaatkan
32	Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada SITAP	Wakil Sekretaris Kabinet	47.(2019)	23/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	kirim 23/01/2019	M-37	23/01/2019	Wakil Sekretaris Kabinet	OUTCOME FO	Naik ke Waseskab
33	Undangan Rapat Pembahasan Penyelesaian Pembangunan SITAP. Rabu, 6 Februari 2019. Pukul 10.00 Wib. Lt.3. (konsep surat deputi ke BPKP, Telkom)	BPKP dan PT Telkom	48.(2019)	23/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	kirim 24/01/2019	63/Maritim/1/2019 dan B-9 dan B-64/Maritim/1/2019	25/01/2019	BPKP dan PT Telkom	OUTCOME FO	Surat Deputi kepada BPKP dan Telkom untuk menindaklanjuti SITAP
34	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kematriman Tahun 2018	Sekretaris Kabinet	50.(2019)	23/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	naik 24/01/19	M-43	24/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME FO	Naik ke Seskab
35	Laporan Rapat Perkembangan Kegiatan Pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Blok Rokan Riau	Sekretaris Kabinet	53.(2019)	24/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	naik 25/01/2019	M-45	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
36	Usulan Topik Sidang Kabinet	Sekretaris Kabinet	54.1(2019)	29/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	naik 25/01/2019	M-50	25/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
37	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Fasilitas Pengolah Sampah Yang Menghasilkan Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Bali	Deputi Bidang Kematriman	56.1(2019)	25/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	-	-	25/01/2019	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
38	Laporan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW	Deputi Bidang Kematriman	56.(2019)	25/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	'siapkan laporan ke seskab dengan rekomendasi 08/02/2019	-	25/01/2019	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
39	Briefing Sheet Rapat Internal Terkait Energi	Sekretaris Kabinet	58.(2019)	28/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	di tandatangani 28/01/2019	M-54	28/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	Naik ke Seskab
40	Briefing Sheet Rapat Internal Terkait SDA	Sekretaris Kabinet	59.(2019)	28/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	di tandatangani 28/01/2019	M-55	28/01/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 3	Naik ke Seskab
41	Penyampaian Usulan Program Kerja, Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja Tahun 2020	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	60.(2019)	28/01/2019	Pjt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	28/01/2019	-	OUTPUT FO	-
42	Laporan Menghadiri Geoseminar Strategi Mitigasi Gunungapi Anak Krakatau di Kawasan Selat Sunda	Deputi Bidang Kematriman	61.(2019)	29/01/2019	Deputi Bidang Kematriman	data ini nanti perlu dimasukkan kedalam perpres no 9/2016 08/02/2019	-	29/01/2019	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Seskab/ Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
43	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan 6th Symposium Asia Pacific Geopark Network (APGN) Tahun 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	63.(2019)	29/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	temui saya untuk mendorong geopark segera ditangani/berbenah untuk dijadikan daya tarik pariwisata 08/02/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
44	Penyampaian Briefing Sheet Terkait Infrastruktur Energi	Deputi Bidang Kemaritiman	64.(2019)	29/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 3	Dimanfaatkan
45	Matriks Usulan Acara/Kegiatan Bidang Energi yang Perlu Kehadiran Presiden	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	65.(2019)	29/01/2019	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	OUTPUT IKK 3	-
46	Penyampaian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018	Karo AKRB	66.(2019)	29/01/2019	Karo AKRB	-	-	-	-	OUTPUT FO	-
47	Penyampaian Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)	Deputi Bidang Kemaritiman	67.(2019)	30/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	ditandatangani 30/01/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan
48	Ringkasan Eksekutif Laporan Keuangan Gabungan KKKS Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Kuartal III Tahun 2018	Sekretaris Kabinet	68.(2019)	31/01/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Ajukan 01/02/2019	M-59	01/02/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
49	Permohonan Bantuan Penerangan Solar Home System (SHS) Tahun 2019 dan Lampu Jalan Solar Cell	'Sekretaris Kabinet	69.(2019)	31/01/2019	Asdep Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Ajukan 01/02/2019	M-61	01/02/2019	'Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
<b>FEBRUARI 2019</b>											
1	Minat penugasan untuk melakukan pengambilalihan saham divestasi PT Vale Indonesia	Seskab, Kemenko Ekon cc Waseskab	70.(2019)	01/02/2019	Seskab	Ajukan. 01/02/2019	M-62 (2019) / 'B.49/Seskab/Maritim/ 02/2019	01/02/2019	Seskab, Kemenko Ekon cc Waseskab	OUTCOME IKK 3	Naik ke Seskab
2	Laporan Perkembangan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PLT'Sa) di 12 Provinsi/Kota	Deputi Bidang Kemaritiman	72.(2019)	06/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	temui saya untuk merumuskan surat menkomar 08/02/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
3	Laporan Kunjungan Kerja Menteri ESDM ke Kamboja Tanggal 14-16 Januari 2019	Seskab	75.(2019)	06/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 08/02/2019	M-72	08/02/2019	Seskab	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
4	Bahan Pertemuan Seskab dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan	Deputi Bidang Kemaritiman	76.(2019)	06/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan
5	Identifikasi dan Distribusi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)	Deputi Bidang Kemaritiman	77.(2019)	06/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	tolong wilayah yang ada geopark dikirim perpresnya tambahkan dalam daftar yang dikirim perpres 08/02/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 2	Direspon oleh Deputi

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
6	Penyampaian Bahan Rapat Koordinasi Pembahasan Monitoring Pelaksanaan Mandatori B20	Deputi Bidang Kemaritiman	78.(2019)	13/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	13/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 3	Dimanfaatkan
7	Permohonan Audiensi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)	Seskab	83.(2019)	11/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	pak banyu temui saya 18/02/2019, naik 18/02/2019	M-83	18/02/2019	Seskab	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi dan Naik Seskab
8	Penyampaian Reviu atas Rencana Penanganan Risiko Tahun 2018	Karo AKR	85.(2019)	11/02/2019	Karo AKR	-	-	11/02/2019	-	OUTPUT FO	-
9	Laporan Rapat Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti Invitation to Visit Pilot Project of Electric Vehicles (Evs), di Singapura tanggal 7-9 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	86.(2019)	13/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	siapkan memo ke seskab 18/02/2019	-	13/02/2019	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
10	Penyampaian Briefing Sheet Terkait Kebijakan Tarif Transportasi Udara dan Penyesuaian Tarif Listrik	Seskab	88.(2019)	13/02/2019	Asdep Perhubungan	naik. 12/02/2019	M-76	12/02/2019	Seskab	OUTCOME IKK 3	Naik ke Seskab
11	Permohonan Peresmian PLTU Cilacap Ekspansi Tahap I (1X660 MW) dan Pelaksanaan Komisioning PLTU Cilacap Ekspansi Tahap II (1X1000MW)	Deputi Bidang Kemaritiman	89.(2019)	14/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	14/02/2019	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
12	Program dan Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	90.(2019)	14/02/2019	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	14/02/2019	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Asdep lain untuk bahan komposisi di Kedepuatan Kemaritiman
13	Permohonan Peresmian Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Sigulati	Deputi Bidang Kemaritiman	93.(2019)	14/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	sdr. Wida temui saya. 20/02/2019	B-0093/Seskab/Martim/03/2019	14/02/2019	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi dan Surat Deputi
14	Undangan FGD "Pemaparan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran di Bidang Kemaritiman Tahun 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	95.(2019)	14/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	14/02/2019	-	OUTPUT FO	-
15	Penyampaian Penjelasan atas Data Capaian Kinerja pada Isian Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan TA 2018	Karo Renkeu	97.(2019)	15/02/2019	Karo Renkeu	-	-	15/02/2019	-	OUTPUT FO	-
16	Laporan Kunjungan Kerja Menteri ESDM ke Roma Tanggal 29-30 Januari 2019	Seskab	98.1(2019)	18/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 22/02/2019	M-80	22/02/2019	Seskab	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab
17	Laporan Rapat Koordinasi KL tentang Pembahasan Lanjutan Penyusunan Tanggapan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi/RUU Migas (Insiatif DOR) di Kementerian ESDM Rabu, 13 Februari 2019	Seskab	101.(2019)	19/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	perbaiki 25/02/2019, naik 25/02/2019	M-97	25/02/2019	Seskab	OUTCOME IKK 1	Naik ke Seskab



No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
18	Permohonan Pengitahuan Suietih/Tahbilid/Jurnal/Media cetak resmi kepada Sesmenko, Sekjen dan Sesmen Kementerian/Lembaga mitra Deputi Bidang Kemaritiman	Kemenkomar, SekjenKPP, Sekjen ESDM, Sekjen Perhub, Sesmen Pariwisata	104.(2019)	20/02/2019	Kemendo dan Sesmenko mitra Deputi Bidang Kemaritiman	perbaiki. 20/02/2019, kirim 21/02/2019	B-141/Maritim/2/2019	21/02/2019	Kemenkomar, SekjenKPP, Sekjen ESDM, Sekjen Perhub, Sesmen Pariwisata	BUKAN OUTPUT	Surat Deputi bersifat administrasi
19	Laporan Menghadiri Rapat Pembahasan Draft Permenko tentang Komite Nasional Geopark Indonesia	Deputi Bidang Kemaritiman	106.(2019)	20/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	oke tunggu undangannya dan ajukan izin ke seskab 20/02/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
20	Laporan Rapat Koordinasi Pengendalian Keselamatan Navigasi Terkait Anjungan dan Gas di Perairan Indonesia	Deputi Bidang Kemaritiman	107.(2019)	20/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
21	Penyampaian Kelengkapan Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018	Karo AKRBB	110.(2019)	20/02/2019	Karo AKRBB	-	-	-	-	OUTPUT FO	-
22	Penyampaian Berkas dan Naskah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	111.(2019)	20/02/2019	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	-	-	-	-	BUKAN OUTPUT	-
23	Laporan Rapat Koordinasi Monitoring Progress Pembangunan PLTMG 10MW dan/atau 25 MW di Kabupaten Kepulauan Morotai	Deputi Bidang Kemaritiman	112.(2019)	20/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
24	Laporan Rapat Koordinasi Finalisasi RPerpres Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan	Deputi Bidang Kemaritiman	113.(2019)	21/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	disiapkan memo ke seskab 25/02/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
25	Program dan Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 yang belum tercantum dalam RKP Tahun 2019	Asdep Bidang Keparawisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim	114.(2019)	22/02/2019	Asdep Bidang Keparawisataan, Ristek, dan Lingkungan Maritim	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Asdep lain untuk bahan kompilasi di Kedepuatan Kemaritiman
26	Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Deputi Bidang Kemaritiman	Deputi Bidang Kemaritiman	116.(2019)	25/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	dittd 25/02/2019	-	-	-	BUKAN OUTPUT	-
27	Penyampaian Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2019	Karo AKRBB	122.(2019)	25/02/2019	Karo AKRBB	-	-	-	-	OUTPUT FO	-
28	Undangan Rapat Kerja Penajaman Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 Deputi Bidang Kemaritiman di Bandung, Jawa Barat	Deputi Bidang Kemaritiman	124.(2019)	25/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kirim 25/02/2019	-	-	-	BUKAN OUTPUT	-
29	Undangan FGD "Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pelaksanaan APBN 2019	asdep 1, 3, 4	125.(2019)	25/02/2019	asdep 1, 3, 4	-	-	-	-	BUKAN OUTPUT	-

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
30	Rencana Penyelenggaraan FGD "Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pelaksanaan APBN 2019 di Bidang Kemaritiman	Deputi Bidang Kemaritiman	128.(2019)	26/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	oke setuju 26/02/2019	-	-	Deputi Bidang Kemaritiman	BUKAN OUTPUT	-
31	Laporan Menghadiri Rapat Rencana Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Goepark)	Deputi Bidang Kemaritiman	131.(2019)	27/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	pak arief & bu wida u/jatahnya setkab supaya yang mengadakan kementerian saja. 01/03/2019	-	-	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
32	Penyempaan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Level Eselon II - Eselon IV Tahun 2019	Kepala Biro AKRBB	140.(2019)	27/02/2019	Kepala Biro AKRBB	-	-	-	Kepala Biro AKRBB	OUTPUT FO	-
33	Penyempaan Laporan Kegiatan Pelatihan Barang/Jasa Pemerintah, pada tanggal 23 s.d. 24 Februari 2019 di Bogor Jawa Barat	Karo SDM	145.(2019)	27/02/2019	Karo SDM	-	-	-	Karo SDM	BUKAN OUTPUT	-
34	Laporan Mengikuti Kunjungan Kerja Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Sumatera Barat, tanggal 21-24 Februari 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	147.(2019)	27/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME FO	*Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
35	Laporan Focus Group Discussion Pengendalian Keselamatan Navigasi Terkait Anjungan Minyak dan Gas di Perairan Indonesia	Deputi Bidang Kemaritiman	148.(2019)	27/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	*Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
36	Penyampaian Ruang Lingkup Pembahasan dan Naskah Undang-undang Rapat Tindak Lanjut Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemanfaatan Energi Baru Dan Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Deputi Bidang Kemaritiman	151.(2019)	27/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Diperbaiki	-	-	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
37	Tindak Lanjut Hasil FGD dan Rapat Kerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	153.(2019)	27/02/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME FO	*Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
<b>MARET 2019</b>											
1	Penyampaian Draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut ARAHAN Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden	Deputi Bidang Kemaritiman	156.(2019)	08/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Selasa temui saya 08/03/2019, kirim 13/03/2019	-	-	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME FO	Direspon oleh Deputi
2	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Kunjungan ke Production Plant dan R&D Center Hyundai Motor, Korea Selatan, tanggal 27 Feb - 1 Mar 2019	Deputi Bidang Kemaritiman	157.(2019)	06/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	perbaiki 15/03/2019	-	-	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
3	Laporan Menghadiri FGD Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Geopark	Deputi Bidang Kemaritiman	162.(2019)	06/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
4	Saran dan Masukan Guna Perumusan Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dari Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Karo AKR	163.(2019)	06/03/2019	Karo AKR	-	-	-	-	OUTPUT FO	
5	Laporan Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet Melalui Pemanfaatan IT, Jumat, 8 Maret 2019 di Hotel The Zuri Palembang	Deputi Bidang Kemaritiman	164.(2019)	06/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTPUT FO	
6	Bahan Rapat Koordinasi APAMI dan PT Citra Tubindo Engineering terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Proyek Ketenagalistrikan	Deputi Bidang Kemaritiman	167.(2019)	06/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Dimanfaatkan sebagai bahan rapat Deputi
7	Laporan Rapat Koordinasi Penambahan Alokasi BBM Bersubsidi Untuk Kapal Ikan < 30 GT	Deputi Bidang Kemaritiman	168.(2019)	06/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
8	Laporan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Pembangunan Jaringan Gas Bumi di Kota Bontang	Deputi Bidang Kemaritiman	173.(2019)	06/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
9	Perkembangan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan	Deputi Bidang Kemaritiman	174.(2019)	06/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
10	Laporan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemanfaatan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung	Deputi Bidang Kemaritiman	175.(2019)	15/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 2	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
11	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Pengusulan IGT Sektor ESDM Bidang Kemaritiman	Deputi Bidang Kemaritiman	176.(2019)	15/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	siapkan undangan rapat hari kamis list peta dilampirkan untuk mendapatkan tanggapan, perlu ditambahkan peta wilayah kerja offshore 22/03/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
12	Penyempalan Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan Kepala BPH Migas	Deputi Bidang Kemaritiman	177.(2019)	20/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik. 20/03/2019	-	20/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Deputi
13	Laporan Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Pengendalian Keselamatan Navigasi Terkait Anjungan Minyak dan Gas di Perairan Indonesia	Deputi Bidang Kemaritiman	181.(2019)	20/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	ok, tks, peta harus di inventarisasi yang masih aktif 22/03/2019	-	20/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 3	Direspon oleh Deputi
14	Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019	Asdep Perhubungan	182.(2019)	20/03/2019	Asdep Perhubungan	-	-	20/03/2019	Asdep Perhubungan	OUTCOME IKK 1	Digunakan Asdep lain untuk bahan komplasi di Kedepuatan Kemaritiman
15	RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI	Sekretaris Kabinet	185.(2019)	21/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 21/03/2019	M-125	21/03/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME IKK 2	Naik Seskab
16	Laporan Rapat Pembahasan Rencana PT Citra Tubindo Engineering dan APAMSI Terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik	Deputi Bidang Kemaritiman	186.(2019)	21/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	yang penting TKDN nya dipenuhi	-	21/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
17	Inventarisasi Kegiatan Tindak Lanjut Atas Arahan Presiden Pada Sidang Kabinet sejak dibentuknya Kabinet Kerja Tahun 2014 s.d. Desember 2018 terkait bidang ESDM.	Asdep Perhubungan	187.(2019)	22/03/2019	Asdep Perhubungan	-	-	22/03/2019	Asdep Perhubungan	OUTCOME IKK 1	Digunakan Asdep lain untuk bahan komplasi di Kedepuatan Kemaritiman
18	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kemaritiman (Peningkatan Aksesibilitas Energi Melalui Penambahan Kuota BBM dan Penambahan Daya Listrik) Daerah- Daerah Terdepan dan Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	Deputi Bidang Kemaritiman	189.(2019)	25/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	surat seskabv sudah atau belum, suratnya ke BPH migas atau menesdm 25/03/2019	-	25/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
19	Permohonan pendirian depo bbm dikabupaten Kepulauan anambas	Deputi Bidang Kemaritiman	190.(2019)	25/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik. Dikirim setelah Pak Seskab selesai cuti. 26/03/2019	-	25/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	Direspon oleh Deputi
20	Data Pembangunan Infrastruktur dan Program-Program Kabinet Kerja di Bidang Kemaritiman Kurun Waktu Oktober 2014 s/d Maret 2019	Sekretaris Kabinet	193.(2019)	26/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	M-135	26/03/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME FO	Naik ke Seskab
21	Permohonan Kunjungan Presiden ke Kabupaten Mandailing Natal	Deputi Bidang Kemaritiman	198.(2019)	27/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik. Apabila Seskab telah aktif kembali. 27/03/2019 Dikirimkan 28/03/2019	Surat Seskab B.29	27/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	OUTCOME IKK 1	Surat Seskab
22	Data Pembangunan Infrastruktur dan Program-Program Kabinet Kerja di Bidang Kemaritiman Kurun Waktu Oktober 2014 s/d Maret 2019	Sekretaris Kabinet	200.(2019)	27/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	M-138	27/03/2019	Sekretaris Kabinet	OUTCOME FO	Naik ke Seskab

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
23	Inventarisasi Program dan Kegiatan KESDM yang Mendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 s.d. 2020	Asdep Perhubungan	205 (2019)	29/03/2019	Asdep Perhubungan	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	'Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
24	Laporan Menghadiri Rapat Tindak Lanjut Pengelolaan Pertambangan Emas di Gunung Botak	Deputi Bidang Kemaritiman	209 (2019)	29/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	'Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan (Dimanfaatkan)
25	Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadinya Gerakan Tanah/Longsor di Seluruh Provinsi Indonesia	Deputi Bidang Kemaritiman	212 (2019)	29/03/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	apakah tidak sebaiknya kita mengacu ke arahan Presiden yg terkait dgn penanganan bencana u/ lebih tegas agar Pemda melakukan pencegahan dini. Temui saya. 02/04/2019	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Respon Deputi
26	Penyampaian Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna/Rapat Terbatas di Sektor ESDM	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	217 (2019)	29/03/2019	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	-	-	-	-	OUTCOME IKK 1	Digunakan Asdep lain untuk bahan komplasi di Kedepuaitan Kemaritiman
<b>APRIL 2019</b>											
1	Percepatan Laporan Hasil Tindak Lanjut Arahan Presiden Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Deputi	Memo Ke Dep Polhukam-Ekon-PMK	M.0280/Maritim-2/04/2019	02-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	dikirim. 07/04/2019	M-142	04/02/2019	Deputi Bidang Polhukam, PMK dan Ekon	Outcome 1	Naik ke Seskab
2	Permintaan Saran/Masukan terkait Draft SOP SITAP	Memo ke Deputi	M.0220/Maritim-2/04/2019	02-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Dirapatkan saja	-	-	-	Outcome FO	Direspon oleh Deputi dan ditindaklanjuti dengan rapat internal Kedepuaitan Bidang Kemaritiman
3	Penyampaian Kelengkapan Muatan Laporan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2018	Memo ke AKRB	M.0222/Maritim-2/04/2019	02-Apr-2019	Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan oleh Biro AKRB
4	Permohonan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 untuk Jabatan yang Tidak Memiliki Pengampu	Memo ke Deputi	M.0223/Maritim-2/04/2019	05-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	dittd 10/04/2019	-	-	-	Outcome FO	Direspon dan ditandatangani oleh Deputi

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
5	Permohonan Walikota Surabaya Guna Fasilitas Percepatan Addendum Perjanjian Jual Beli Listrik PLTIs Benowo	Memo ke Seskab	M.0225/Maritim-2/04/2019	08-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	segera. Perbaiki surat seskab masukan angka 5 dim surat memo deputi. 15/04/19, naik 16/04/2019	M-154	16/04/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Direspon oleh Deputi dan ditindaklanjuti dengan Surat Seskab
6	PENYAMPAIAN BAHAN PAPARAN SEBAGAI NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK), DI MAKASSAR TANGGAL 11 APRIL 2019	Memo ke Deputi	M.0235/Maritim-2/04/2019	09-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan untuk bahan sebagai Narasumber di Makassar
7	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah-Langkah Percepatan Pemenuhan BBM dan Pemulihan Lingkungan dan Masyarakat Pasca Bencana Alam di Manggarai Barat	Memo ke Deputi	M.0237/Maritim-2/04/2019	10-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
8	Laporan Rapat Koordinasi Progress Terkini Rencana Pembangunan PLTMG 10 MW TA. 2019 dan Potensi Pembangunan PLTM di Kabupaten Pulau Morotai	Memo ke Deputi	M.0246/Maritim-2/04/2019	10-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
9	Penyampaian Data Capaian Progress Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan Januari-Maret 2019	Memo ke Renkeu	M.0247/Maritim-2/04/2019	12-Apr-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan					Outcome FO	Dimanfaatkan oleh Biro AKRB
10	Penyampaian Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Tahun 2019 yang Tidak Memiliki Pengampu di Kedepkatan Bidang Kemaritiman	Memo ke AKRB	M.0250/Maritim-2/04/2019	16-Apr-2019	Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Outcome FO	Dimanfaatkan oleh Biro AKRB
11	Bahan Rapat Terbatas Tentang Tindak Lanjut Kunjungan Presiden ke Arab Saudi Briefing Sheet Terkait Skema Pembiayaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Khususnya Pembangkit Listrik Berbasis Energi Baru Terbarukan	Memo ke Seskab	M.0259/Maritim-2/04/2019	18-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	diirim. 18/04/2019	M-157	18/04/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Dimanfaatkan sebagai bahan Ratas
12	Permohonan pengundangan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Memo ke Deputi	M.0263/Maritim-2/04/2019	22-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan sebagai bahan Rapat
13	Laporan Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Pengendalian Keselamatan Navigasi Terkait Arjungan Minyak dan Gas di Perairan Indonesia, Tanggal 22 April 2019	Memo ke Deputi	M.0267/Maritim-2/04/2019	22-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	diperbaiki. Ub. Seskab. Dep Mar. 22/04/2019, kirimkan 23/04/2019				Outcome 2	Direspon dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan
14		Memo ke Deputi	M.0268/Maritim-2/04/2019	24-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-ok tks, agar di sharing paparan dari k/1 u/ asdep 1, guna tindak lanjut kebijakan satu peta bid kemaritiman, 29/04/2019				Outcome 1	Direspon dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi/Seskab/Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
15	Laporan Rapat Klarifikasi RPerpres Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran Dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran	Memo ke Deputi	M.0265/Maritim-2/04/2019	25-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	25-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	25-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
16	Pemohonan Anggota Delegasi Sebagai Negosiator pada Bonn Climate Change Conference (BBSTA-50, SBI-50) Tanggal 17-27 Juni 2019 di Bonn, Jerman	Memo ke Waseskab	M.0270/Maritim-2/04/2019	25-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik. 29/04/2019	M-167	29/04/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik. 29/04/2019	Wakil Sekretaris Kabinet	29/04/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	naik ke Waseskab
17	Laporan Menghadiri Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) di Makassar	Memo ke Deputi	M.0271/Maritim-2/04/2019	26-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	26-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	26-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
18	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan	Memo ke Deputi	M.0272/Maritim-2/04/2019	29-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kamis dibahas ulang dg saya, 29/4/2019	-	29-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	29-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 2	Direspon dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan
19	Penyampaian Perbaikan Target Informasi Kinerja FO TA 2020 ke Deputian Bidang Kemaritiman	Memo ke Deputi	M.0276/Maritim-2/04/2019	29-Apr-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	29-Apr-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	29-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome FO	Dimanfaatkan oleh Biro Renkeu
20	Laporan Focus Group Discussion (FGD) Alternatif Lahan Strategis Proyek Grass Root Refinery	Memo ke Deputi	M.0277/Maritim-2/04/2019	30-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	30-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	30-Apr-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
<b>MEI 2019</b>															
1	OTENTIFIKASI DAN DISTRIBUSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI	Memo ke Deputi dan Surat Deputi	M.0280/Maritim-2/04/2019	02/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	dikirim 02/05/2019	B.0335/Maritim/05/2019	06/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	02/05/2019	KL Terkait	06/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 2	Surat Deputi ke K/L
2	Laporan Penyampaian Kronologis Perizinan Tambang Emas di Gunung Botak dan Gogrea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku	Memo ke Deputi	M.0281/Maritim-2/05/2019	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan
3	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Alokasi Anggaran Pasang Baru Listrik 450 VA bagi Rumah Tangga Miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku	Memo ke Deputi	M.0287/Maritim-2/05/2019	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan
4	Laporan Rapat Klarifikasi tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan	Memo ke Deputi	M.0288/Maritim-2/05/2019	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	03/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
5	Briefing Sheet Sektor Minyak dan Gas Bumi Rapat Terbatas Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1440H/2019M	Memo ke Asdep	M.0290/Maritim-2/05/2019	02/05/2019	Asisten Deputi Bidang Perhubungan	M-174	naik.02/05/2019	02/05/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	dimanfaatkan Asdep 3 untuk Bahan Ratas Idul Fitri
6	Penyampaian Matriks Aspirasi Daerah Bidang ESDM	Memo ke Asdep	M.0290.1/Maritim-2/05/2019	06/05/2019	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	Outcome 1	diberikan ke Asdep Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya dikompilasi dan dinaikkan ke Deputi
7	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Regional Sumatera di Padang, Sumatera Barat	Memo ke seskab	M.0291/Maritim-2/05/2019	07/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	perbaiki 07/05/2019, naik 14/05/2019	M-192 B-0185/Seskab	07/05/2019 14/05/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dinaikkan ke Seskab terdapat Surat Seskab ke MESDM, Kemenpar dan Bappenas
8	Pemohonan Audiensi Managing Director Chevron IndAsia Business Unit dan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia Kepada Sekretaris Kabinet	Memo ke Seskab	M.0293/Maritim-2/05/2019	08/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik, 8/05/2019	M-185	08/05/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dinaikkan ke Seskab
9	Progress Penyelesaian Permasalahan pada Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)	Memo ke Pusdatin	M.0295/Maritim-2/05/2019	08/05/2019	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	-	-	-	-	Outcome FO	Dikirim ke Pusdatin sebagai bahan tindak lanjut yang harus dilakukan Pusdatin
10	Penyempalan Tindak Lanjut Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)	Memo ke Waseskab	M.0296/Maritim-2/05/2019	08/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik. 10/05/2019	M-187	09/05/2019	Wakil Sekretaris Kabinet	Outcome FO	Dinaikkan ke Waseskab
11	Persiapan Bahan Evaluasi Program/Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2019	Memo ke asdep	M.0297/Maritim-2/05/2019	09/05/2019	Asdep 1, 3, 4	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan setiap Asdep untuk menyusun Evaluasi Program/ Anggaran per asdep
12	Upaya Peningkatan Ekspor dan Kerja Sama Ekonomi Lainnya Antara Indonesia Dengan Irak	Memo ke Deputi	M.0299/Maritim-2/05/2019	09/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan
13	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Program BBM Satu Harga Tahun 2018 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2019	Memo ke Deputi	M.0300/Maritim-2/05/2019	09/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan
14	Penyempalan Data Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan April 2019	Memo ke Renkeu	M.0301/Maritim-2/05/2019	09/05/2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan oleh Biro AKRB
15	Penyempalan Masukan atas Rumusan dan Rencana Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretaris Kabinet Tahun 2019	Memo ke asdep	M.0302/Maritim-2/05/2019	09/05/2019	Asdep Bidang Keperawatan Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan oleh Biro AKRB



No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/ Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
16	Penyampaian RAB dan KAK Pagu Indikatif dan Pengajuan Tambahan Anggaran 2020 Kedeputian Bidang Kemaritiman	Memo Ke Deputi lain	M.0303/Maritim-2/05/2019	09/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	di ttd 10/05/2019	M-191	10/05/2019	Deputi Bidang Administrasi	Outcome FO	Dimanfaatkan Deputi Bidang Administrasi untuk Pengajuan Anggaran ke DIA
17	Laporan Pelaksanaan Sidang Anggota ke-28 Dewan Energi Nasional	Memo Ke Seskab- Presiden	M.0304/Maritim-2/05/2019	20/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan
18	Laporan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Menko Bidang Kemaritiman perihal Percepatan, Pengembangan dan Penggunaan Aspal Buton	Memo Ke Deputi	M.0310/Maritim-2/05/2019	20/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan
19	Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tentang Realisasi Kerja Sama Indonesia Dengan Arab Saudi Pada Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Cilacap	Memo Ke Deputi	M.0311/Maritim-2/05/2019	23/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	sudah dilaksanakan 10/06/2019	-	10/06/2019	-	Outcome 1	Direspon oleh Deputi Bidang Kemaritiman
20	Rencana Siemens Dalam Pembangunan Powerhouse Energi Baru	Memo Ke Seskab	M.0312/Maritim-2/05/2019	24/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 31/05/2019	M-204	31/05/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dinaikkan ke Seskab
21	Penyampaian KAK dan RAB Pengajuan Tambahan Anggaran 2020 Kedeputian Bidang Kemaritiman	Memo Ke Deputi	M.0315/Maritim-2/05/2019	28/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome FO	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan
22	Penyampaian Kebutuhan Anggaran Tahun 2020 Kedeputian Bidang Kemaritiman	Memo Ke Depmin	M.0318/Maritim-2/05/2019	28/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kirim 21/05/2019	M-194	21/05/2019	Deputi Bidang Administrasi	Outcome FO	Dimanfaatkan Deputi Bidang Administrasi
23	Penyampaian Catatan Mengenai Plan of Development dan Skema Gross Split Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	Memo Ke Seskab	M.0319/Maritim-2/05/2019	31/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik, 31/05/2019	M-205	31/05/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dinaikkan ke Seskab
24	Kuota Produksi Batubara Provinsi Kalimantan Timur	Memo Ke Seskab- Presiden	M.0324/Maritim-2/05/2019	31/05/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pengambilan keputusan

**JUNI 2019**

1	Penyampaian Bahan Rapat Intern membahas Kerja Sama Saudi Aramco dan PT Pertamina (Persero)	Memo Ke Seskab n presiden	M.0325/Maritim-2/05/2019	12/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kirim, 12/06/2019	M-212	12/06/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Dinaikkan ke Seskab
2	Perkembangan Tindak Lanjut Kerja Sama Indonesia dengan Arab Saudi pada Proyek Refinery Development Mater Plan (RDPM) Kilang Cilacap	Memo Ke Seskab- Presiden	325.1(2019)	12/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 12/06/2019	M-209	12/06/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dinaikkan ke Seskab

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/ Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
3	Revisi Peraturan Perpres Nomor 146 Tahun 2019; Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri; PP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas	Memo ke Deputi	331.1 (2019)	12/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	12/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 2	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan Rapat
4	Bahan Evaluasi Program/Kegiatan, dan Anggaran Semester I dan Rencana Kegiatan Semester II Tahun 2019	Asdep-Asdep	331.2	12/06/2019	Asdep 1,2,3	-	-	12/06/2019	Asdep 1,2,3	Outcome FO	Dimanfaatkan Asdep untuk menyusun Rencana Kegiatan
5	PERMOHONAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA PRESIDEN GUNA MENGHADAP TERKAIT KELANGSUNGAN LAPANGAN GAS, BLOK CORRIDOR, SUMATERA SELATAN	Asdep-Deputi-Seskab- Presiden	328. (2019)	12/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	M-211	12/06/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Dinaikkan ke Seskab
6	Permohonan Audiensi Chief Executive Officer/General Electric Indonesia Kepada Sekretaris Kabinet	Asdep-Deputi-Seskab	331. (2019)	14/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 13/06/2019	M-221	13/06/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dinaikkan ke Seskab
7	Penyampaian Data Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan Mei 2019	Asdep-Asdep	333. (2019)	14/06/2019	Kepala biro perencanaan dan keuangan	-	-	14/06/2019	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Biro Renkeu
8	Laporan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Kaji Banding Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan dari Sekam Padi	Asdep-Deputi	335. (2019)	18/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pengambilan keputusan
9	Laporan Rapat Koordinasi Realisasi Fasilitas Pengolahan DIME (Dimethyl Ether), Produk Urea, dan Polypropylene Dalam Rangka Diversifikasi untuk Konservasi dan Ketahanan Energi.	Asdep-Deputi	340. (2019)	14/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	14/06/2019	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pengambilan keputusan
10	Permohonan Audiensi Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)	Memo ke Seskab- Presiden	341. (2019)	14/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	diperbaiki sesuai catatan, font diperhatikan sesuai tata naskah 17/06/2019, naik 17/06/2019	M-229	17/06/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Dinaikkan ke Seskab
11	Briefing sheet audiensi sekretaris kabinet dengan CEO GE Indonesia	Asdep-Deputi-Seskab	343. (2019)	24/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 24/06/2019	M-231	24/06/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dinaikkan ke Seskab
12	Penyampaian kesepakatan Rapat Penguasaan PFRambang Batubara tanggal 21 Juni 2019	Asdep-Deputi	354. (2019)	24/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	B-418/Maritim/6/2019	17/06/2019	Kemenkomar, Kemenko Ekon, Kemenkeu	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai pengambilan keputusan
13	Penyampaian Usulan IT to Business Alignment dalam penyusunan Rencana Induk Sistem dan Teknologi Informasi (RISTI)	Asdep-Asdep	357. (2019)	24/06/2019	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Pustadatin

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Seskab/Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
14	Pengusahaan Batubara	Asdep-Deputi-Seskab-Presiden	358. (2019)	26/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	B-466/Maritim/6/2019	28/06/2019	Kemenkomar, Kemenko Ekon, Kemenkeu	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai pengambilan keputusan
15	Permohonan Audiensi President Director dan CEO PT Siemens Indonesia dengan Seskab	Memo Ke Seskab	367. (2019)	28/06/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik. 28/06/2019	M-240	28/06/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dinaikkan ke Seskab
<b>JULI 2019</b>											
1	Laporan Menghadiri Bonn Climate Change Conference (BCCC) Jerman 17-27 Juni 2019	Asdep -> Deputi	371. (2019)	03/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Asdep. & 2. 1) Agar ada output sebaiknya ada memo Depmar ke Depekon, 2) setuju untuk ditindaklanjuti isu kelautan oleh Asdep. 1. 10/07/2019, Kirim 11/07/2019	M-255	10/07/2019 11/07/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
2	Penyampaian Permohonan Revisi Tahun Anggaran 2019 Kedeputian Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputi	M.0373/Maritim-2/07/2019	03/07/2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Deputi Bidang Administrasi sebagai bahan pengambilan keputusan
3	Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019	Asdep -> Karo Renkeu	M.0374/Maritim-2/07/2019	03/07/2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Karo Renkeu sebagai bahan pengambilan keputusan
4	Matriks Capaian Utama Dalam Kerangka "Bersatu Menuju Indonesia Unggul" Bidang energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019	Asdep -> Asdep	M.0375/Maritim-2/07/2019	04/07/2019	Asdep Perhubungan	-	M.0242/Maritim/07/2019	04/07/2019	Deputi Polhukam	Outcome 1	Dikompliasi oleh Asdep perhubungan yang selanjutnya naik ke Deputi dan dikirimkan ke Deputi Polhukam
5	Permohonan Audiensi Chairman and CEO General Electric Company kepada Presiden	Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden	M.0377/Maritim-2/07/2019	04/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 04/07/2019	M-244	04/07/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Naik ke Seskab
6	Penyampaian Data Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan Juni 2019	Asdep -> Karo Renkeu	M.0378/Maritim-2/07/2019	04/07/2019	Karo Renkeu	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Karo Renkeu sebagai bahan pengambilan keputusan
7	Penyampaian Data Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Papua Barat	Asdep -> Asdep	M.0381/Maritim-2/07/2019	04/07/2019	Asdep Perhubungan	-	M.0250/Maritim/07/2019	09/07/2019	Deputi Polhukam	Outcome 1	Dikompliasi oleh Asdep perhubungan yang selanjutnya naik ke Deputi dan dikirimkan ke Deputi Polhukam
8	Tindak Lanjut Hasil Rakor Evaluasi dan Pelaksanaan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga Tahun 2018 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2019	Asdep -> Deputi	M.0384/Maritim-2/07/2019	08/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan
9	Laporan Rapat Importasi Barang Wajib (Cooling Water Pipe/CW Pipe) pada Proyek PLTU Batang	Asdep -> Deputi	M.0386/Maritim-2/07/2019	08/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Deputy/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
10	Poltek-polek Diskusi yang akan disampaikan Chairman and CEO General Electric Company kepada Presiden	Asdep -> Deputy/Seskab	M.0387/Maritim-2/07/2019	08/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 07/07/2019	M-251	naik 07/07/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Naik ke Seskab
11	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Finalisasi Draft Kepmenko Kemaritiman Tentang Tim Pelaksana Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)	Asdep -> Deputy	M.0388/Maritim-2/07/2019	09/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai pertimbangan pengambilan keputusan
12	Pengusahaan Pertambangan Batubara (surat ESDM)	Asdep -> Deputy	M.0393/Maritim-2/07/2019	12/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	memo ke presiden ditambahkan bahwa telah diteruskan ke ESDM untuk ditanggapi 18/07/2019 sdr. Wida. Konsep seperti semula. Memo ke Presiden surat balasan ke KPK sesuai pembicaraan. 19/07/19, naik 25/07/2019	B.0466/Maritim/07/2019	04/07/2019	Kemenko Maritim, Kemenko Ekon, KemenESDM, Kemenkeu, Setneg, Kemendagri, Kemendag	Outcome 1	Surat Keluar
13	Briefing Sheet Rapat Terbatas Membahas Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di 12 Provinsi/Kota di Indonesia	Asdep -> Deputy/Seskab	M.0396/Maritim-2/07/2019	12/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 12/07/2019	M-258	12/07/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Naik ke Seskab
14	Rapat Penyajian Bahan Rapat Terbatas Tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Asdep -> Asdep	M.0401.1/Maritim-2/07/2019	12/07/2019	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim/Asisten Deputi Bidang Perhubungan	-	M.0259/Maritim/07/2019 M.0621/Seskab/07/2019	15/07/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Dikomplasi oleh Asdep 4 dan dinaikkan ke Deputy-Seskab- Presiden
15	Briefing Sheet Pertemuan Presiden dengan Pimpinan Inpex Tokyo	Asdep -> Deputy/Seskab	M.0403/Maritim-2/07/2019	15/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 15/07/2019	M.0261/Maritim/07/2019 M.0627/Seskab/07/2019	15/07/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Outcome 3	Naik Seskab
16	Penyampaian Data Dukungan dan Narasi Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2019	Asdep -> Karo ACRB	M.0409/Maritim-2/07/2019	17/07/2019	Karo ACRB	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Karo ACRB sebagai bahan pengambilan keputusan
17	Laporan Rapat Koordinasi Membahas Percepatan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik di 12 Kota	Asdep -> Deputy/Seskab	M.0417/Maritim-2/07/2019	19/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	ditambahkan sedikit. 19/07/19 naik. 19/07/2019	M.0269/Maritim/07/2019	19/07/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik Seskab
18	Penyampaian Hasil Pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019	Asdep -> Karo ACRB	M.0427/Maritim-2/07/2019	19/07/2019	Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Karo ACRB sebagai bahan pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputy/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
19	Laporan Rapat Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Sektor ESDM	Asdep -> Deputy	M.0429/Maritim-2/07/2019	19/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan
20	Konsep Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi Yang Berlaku Dalam Wilayah Pemerintah Aceh	Asdep -> Deputy/Seskab/K/L	M.0430/Maritim-2/07/2019	22/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	B.0006/Maritim-2/07/2019	23/07/2019	Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Outcome 1	Surat Asdep
21	Laporan Rapat Pembahasan Alokasi Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar (Gas Oli) untuk Konsumen Pengguna Tahun 2019	Asdep -> Deputy	M.0433/Maritim-2/07/2019	23/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan
22	Laporan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLTSa di Kota Semarang	Asdep -> Deputy/Seskab	M.0434/Maritim-2/07/2019	24/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik, 29/07/2019	M.0272/Maritim/07/2019 B-0559/Maritim/07/2019	24/07/2019 25/07/2019	Sekretaris Kabinet Wali Kota Semarang	Outcome 1	Naik Seskab
23	Penyampaian Bahan Rapat Intern Tentang Subsidi Energi (Listrik, BBM, dan LPG)	Asdep -> Deputy	M.0436/Maritim-2/07/2019	29/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Naikan, 29/07/2019	M.0272/Maritim/07/2019	29/07/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Naik Seskab
24	Persetujuan terhadap Susunan dan Organisasi Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)	Asdep -> Deputy/Seskab	M.0440/Maritim-2/07/2019	30/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	segera kirim, 30/07/2019	B-567/Maritim/07/2019 01 9	30/07/2019	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Surat Deputi
25	Laporan Rapat Policy Exercise Dengan Konsep Circular Economy Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah	Asdep -> Deputy	M.0445/Maritim-2/07/2019	30/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan
26	Penyampaian Matriks Kompliasi Ringkasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2014-2019 di Lingkungan Kedeputan bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy	M.0446/Maritim-2/07/2019	31/07/2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan
<b>AGUSTUS 2019</b>											
1	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas Mitigasi Risiko Dan Jaminan Penyediaan Listrik	Asdep -> Deputy	M.0457/Maritim-2/07/2019	05-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	di ttd 05/08/2019	M.0282/Maritim/08/2019	05-Agust-19	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Naik Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan Ratas
2	Laporan Rapat Klarifikasi RPerpres tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan, di Kementerian Sekretariat Negara tanggal 25 Juli 2019	Asdep -> Deputy	M.0466/Maritim-2/08/2019	06-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 2	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Deputy/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
3	Laporan Perjalanan Dinas Menghadiri Commissioning Test (Individual Test) Proyek Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PLTsa) di TPA Sumur Batu Kota Bekasi	Asdep -> Deputy Asdep	M.0476/Maritim-2/08/2019	06-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik. 06/08/2019	M.0290/Maritim/08/2019	06-Agust-19	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
4	Laporan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLTsa di Kota Surabaya dan Kota Palembang	Asdep -> Deputy Asdep	M.0477/Maritim-2/08/2019	06-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik & kirim. 06/08/2019	M.0292/Maritim/08/2019	06-Agust-19	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
5	Bahan Rapat Intern Tentang Kendaraan Listrik	Asdep -> Deputy Asdep	M.0478/Maritim-2/08/2019	06-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	(lisan) ok naik. 06/08/2019	M.0293/Maritim/08/2019 M.0706/Seskab/08/2019	06/08/2019 07 Agustus 2019	Sekretaris Kabinet Presiden	Outcome 3	Naik Seskab dan dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Intern
6	Penyampaian Permohonan Revisi Tahun Anggaran 2019 Asisten Deputi Bidang Keperawatan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim di Kedepkatan Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy Asdep	M.0479/Maritim-2/08/2019	07-Agust-2019	Deputi Bidang Administrasi					Outcome FO	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
7	Penyampaian Matriks Capaian Pengawasan Kepada Sekretaris Kabinet Dalam Penyusunan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi Presiden Periode Oktober 2014 – Juni 2019 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Asdep -> Asdep	M.0480/Maritim-2/08/2019	07-Agust-2019	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan		M-0294/Maritim/08/2019	08-Agust-19	Deputi Bidang PMK	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
8	Penyampaian Data Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan Juli 2019	Asdep -> Asdep	M.0481/Maritim-2/08/2019	08-Agust-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan					Outcome FO	Digunakan Kepala Biro Renkeu untuk bahan pengambilan keputusan
9	1. Permohonan Audiensi Dewan Direksi Indonesia Petroleum Association Dengan Sekretaris Kabinet, 2. Permohonan Presiden Untuk Membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition ke-43 Tahun 2019	Asdep -> Deputy Asdep	M.0483/Maritim-2/08/2019	08-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	diperbaiki memo presiden, dan memo seskab, 08/08/2019 naik, 08/08/2019	M.0296/Maritim/08/2019	08-Agust-19	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
10	Tindak Lanjut Proyek Masela Pasca Penyerahan PoD	Asdep -> Deputy Asdep	M.0484/Maritim-2/08/2019	08-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	di pakai u/ bahan monitor kita (krm sudah lewat), 09/08/2019				Outcome 1	Respon Deputi
11	Laporan Rapat Koordinasi Perluasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dan Peningkatan Aksesibilitas Energi di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Asdep -> Deputy Asdep	M.0485/Maritim-2/08/2019	08-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
12	Laporan Menghadiri Workshop/Rapat Kerja Penyusunan RAN Geopark	Asdep -> Deputy Asdep	M.0486/Maritim-2/08/2019	08-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Deputy/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
13	Penyampaian Rencana Penarikan Dana dan Rencana Kegiatan Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Semester II Tahun Anggaran 2019	Asdep -> Deputy	M.0487/Maritim-2/08/2019	09-Agust-2019	Deputy Bidang Administrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
14	Penyampaian Bahan Rapat Terbatas Membahas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori B20	Asdep -> Deputy	M.0489/Maritim-2/08/2019	12-Agust-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	naik 12/08/2019	M.0298/Maritim/08/2019 M.0732/Seskab/08/2019	12/08/2019 12 Agustus 2019	Sekretaris kabinet Presiden	Outcome 3	Naik ke Seskab dan Presiden
15	POINTERS KEYNOTE SPEECH SEKRETARIS KABINET PADA HUT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) KE-41	Asdep -> Deputy	M.0490/Maritim-2/08/2019	13-Agust-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	di ttd 15/08/2019	M.0301/Maritim/08/2019	15-Agust-19	Deputy Bidang Perekonomian	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
16	Kerja Sama yang Dipekati dalam The 6th Indonesia-China Energy Forum (ICEF ke-6) dan Beberapa Pertemuan Bilateral di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tanggal 7-10 Juli 2019	Asdep -> Deputy	M.0494/Maritim-2/08/2019	14-Agust-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
17	Usulan Topik Capaian 5 Tahun Kinerja Sekretaris Kabinet di Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy	M.0495/Maritim-2/08/2019	14-Agust-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
18	Penyampaian KAK dan RAB Pagu Anggaran 2020 Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Asdep -> Deputy	M.0499/Maritim-2/08/2019	19-Agust-2019	Deputy Bidang Administrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
19	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Konservasi Energi dan Pemenuhan Energi Bagi Pembangunan Daerah	Asdep -> Deputy	M.0502/Maritim-2/08/2019	19-Agust-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
20	Bahan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLTsa Legok Nangka Regional Provinsi Jawa Barat	Asdep -> Deputy	M.0504/Maritim-2/08/2019	20-Agust-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan sebagai bahan rapat Deputy tgl 20 Agustus 2019 terkait Pembahasan Sumber dan Mekanisme Pendanaan dan Pengembangan Investasi Proyek PLTsa Legok Nangka Regional Jawa Barat
21	Laporan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLTsa Legok Nangka Regional Provinsi Jawa Barat	Asdep -> Deputy	M.0505/Maritim-2/08/2019	22-Agust-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	diperbaiki sesuai pembahasan. 21/08/19, naik 22/08/2019	M.0306/Maritim/08/2019 B.0639/Maritim/08/2019	22-Agust-19	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
22	Permohonan Kepada Presiden Membuka The 6th Asia Pacific Geopark Network (APGN) Symposium Tahun 2019 di Mataram, Nusa Tenggara Barat	Asdep -> Deputy	M.0507/Maritim-2/08/2019	23-Agust-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	naik 23/08/2019	M.0308/Maritim/08/2019 M.0781/Seskab/08/2019	23/08/2019 26 Agustus 2019	Sekretaris Kabinet Presiden	Outcome 3	Naik ke Seskab

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
23	Optimalisasi Pemanfaatan Energi Thorium Guna Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional	Asdep -> Deputy	M.0510/Maritim-2/08/2019	23-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	perbaiki surat 23/08/2019, perbaiki 26/08/2019	M.0311/Maritim/08/2019	26-Agust-19	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
24	Permohonan Audiensi ThorCon International, Pte. Ltd dengan Sekretaris Kabinet	Asdep -> Deputy	M.0513/Maritim-2/08/2019	23-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	perbaiki surat seskab sesuai catatan saya pada draft naskah surat 23/08/2019, setelah saya pertimbangkan karena ditunjukkan sama halnya sama, muat surat diterima apabila dipandang perlu 26/08/2019 sudah di ltrd deputy	M.0311/Maritim/08/2019	26-Agust-19	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
25	Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden Terhadap Pembangunan/Pengembangan Kiang Minyak Dalam Negeri	Asdep -> Deputy	M.0514/Maritim-2/08/2019	23-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kirim. 26/08/2019	-	-	-	Outcome 1	Surat Deputy
26	Kajian Pengaturan Tata Ruang Terkait Ruang Bebas Jaringan Transmisi Listrik	Asdep -> Deputy	M.0515/Maritim-2/08/2019	23-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	rabu siang pukul 14.00. 26/08/2019 siapkan memo ke Seskab u/ melaporkan apa yg telah kita lakukan & yg akan kita lakukan terkait blackout listrik. 26/08/2019	-	-	-	Outcome 1	Respon Deputy
27	Ketegaan Kebenaran Pengaturan Pelumas di Indonesia	Asdep -> Deputy	M.0516/Maritim-2/08/2019	26-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
28	Daftar Informasi Publik pada Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Asdep -> Karo Pusdatin	M.0518/Maritim-2/08/2019	27-Agust-2019	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Kapusdatin sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
29	Permohonan Memberikan Sambutan dan Membuka Seminar dan Pameran Ketenagalistrikan Hari Listrik Nasional Ke 74 Tahun 2019	Asdep -> Deputy	M.0521/Maritim-2/08/2019	27-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
30	Matriks Perkembangan Tindak Lanjut Janji Presiden pada Acara Resmi Kenegaraan dan Kunjungan Kerja bulan Juli 2019 di Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy	M.0524/Maritim-2/08/2019	27-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
31	Penyempalan Topik Capaian 5 Tahun Kinerja Sekretaris Kabinet di Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy	M.0526/Maritim-2/08/2019	27-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan



No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Deputy/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
32	Bahan rapat Pembahasan Draf Perjanjian Jual Beli PLTsa Benowo - Kota Surabaya	Asdep -> Deputy	M.0527/Maritim-2/08/2019	28-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	28-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
33	Klarifikasi dan Identifikasi Penyelesaian Permasalahan terkait Kebijakan Pemerintah Baik Pusat dan Daerah guna Mengantisipasi Kejadian Gagalnya Fungsi Jaringan Transmisi Listrik	Asdep -> Deputy	M.0531/Maritim-2/08/2019	28-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	28-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
34	Laporan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLTsa di Kota Surabaya	Asdep -> Deputy	M.0532/Maritim-2/08/2019	29-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 29/08/2019	M.321/ Maritim/08/2019 B.0316/Maritim/09/2019	29-Agust-2019 29 September 2019	Sekretaris Kabinet Jaksa Agung	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
35	Pengisian Tindak Lanjut Janji dan Hasil Kunjungan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)	Asdep -> Deputy	M.0534/Maritim-2/08/2019	29-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	29-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome FO	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
36	Laporan Identifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait Ruang Bebas Transmisi dan Jarak Bebas Minimum (ROW) pada jaringan transmisi listrik	Asdep -> Deputy	M.0535/Maritim-2/08/2019	29-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	29-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
<b>SEPTEMBER 2019</b>											
1	Laporan Identifikasi Peraturan Perundang-undangan terkait Ruang Bebas Transmisi dan Jarak Bebas Minimum (ROW) pada jaringan transmisi listrik	Asdep -> Deputy	M.0536/Maritim-2/08/2019	29-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	29-Agust-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
2	Naskah Surat Penyampaian Kesepakatan Rapat Pembangunan PLTsa Kota Surabaya	Asdep -> Deputy	M.0536/Maritim-2/08/2019	03-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	dikirim u/ percepat bisa imel latau wa.3/09/2019	B.0316/Seskab/Maritim/09/2019	02-Sep-19	-	Outcome 1	Respon Deputy
3	Briefing Sheet Pertemuan Sekretaris Kabinet Dengan CEO General Electric Indonesia	Asdep -> Deputy	M.0549/Maritim-2/09/2019	04-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	04-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan sebagai bahan audiensi Pertemuan Sekretaris Kabinet dengan CEO General Electric Indonesia Pada tanggal 4 September 2019 di Sekretariat Kabinet
4	Penyampaian Permohonan Revisi Tahun Anggaran 2019 Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kedeputian Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy	M.0550/Maritim-2/09/2019	06-Sep-2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	06-Sep-2019	Deputi Bidang Administrasi	Outcome FO	Digunakan Deputy Bidang Administrasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
5	Penyusunan Data Dukung Rencana Aksi Unit Kerja Eselon II dalam Rangka Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 20 September 2019 Kedeputian Bidang Kemaritiman	Asdep-Asdep	M.0552/Maritim-2/09/2019	06-Sep-2019	Asdep 1,3 dan 4	-	-	06-Sep-2019	Asdep 1,3 dan 4	Outcome FO	Digunakan para Asdep sebagai pertimbangan pengambilan keputusan
6	Laporan Menghadiri Konsultasi Regional Penyusunan RPJMN 2020-2024 Regional Nusa Tenggara (Observer)	Asdep -> Deputi	M.0553/Maritim-2/09/2019	06-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	06-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
7	Penyampaian Data Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan Agustus 2019	Asdep -> Biro AKRB	M.0554/Maritim-2/09/2019	09-Sep-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	09-Sep-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Outcome FO	Digunakan Biro AKRB dalam pengambilan keputusan
8	PENYAMPAIAN BAHAN-BAHAN TERKAIT MASUKAN TERHADAP REGULASI BIDANG ENERGI	Asdep -> Deputi	M.0557/Maritim-2/09/2019	09-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	09-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
9	Penyampaian Data Dukung Rencana Aksi Kedeputian Bidang Kemaritiman Tahun 2019	Asdep -> Biro AKRB	M.0560/Maritim-2/09/2019	10-Sep-2019	Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	10-Sep-2019	Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Outcome FO	Digunakan Biro AKRB dalam pengambilan keputusan
10	Laporan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pemantauan Sumber Daya Alam, Pengembangan Infrastruktur Pendukung Sektor Energi dan Sumber Daya Air, serta Pelaksanaan Program Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Asdep -> Deputi	M.0561/Maritim-2/09/2019	10-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	10-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
11	LAPORAN PROGRESS PENYAJIAN BAHAN RAPAT TERBATAS MENGENAI PERBAIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA (EKOSISTEM INVESTASI) DI SEKTOR MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN	Asdep -> Deputi	M.0562/Maritim-2/09/2019	16-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 16/09/2019	-	16-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Respon Deputi
12	Penyampaian Paraf Persetujuan Rancangan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Asdep -> Deputi	M.0573/Maritim-2/09/2019	18-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	18-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome FO	Digunakan Deputi Bidang Administrasi sebagai bahan pertimbangan keputusan
13	Laporan Menghadiri Rapat Pemaparan Laporan Akhir Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT)	Asdep -> Deputi	M.0580/Maritim-2/09/2019	19-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	19-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
14	Penyampaian Bahan dalam Rangka Survei Penilaian Internal Evaluasi Pelaksanaan RB dan SAKIP pada tanggal 20 September 2019	Asdep -> Deputi	M.0583/Maritim-2/09/2019	19-Sep-2019	Asdep 1., 3 dan 4	-	-	19-Sep-2019	Asdep 1., 3 dan 4	Outcome FO	Digunakan para Asdep sebagai bahan Survey Internal Pelaksanaan SAKIP dan RB
15	Laporan Mengikuti Leadership and Management Training di Manchester, United Kingdom	Asdep -> Deputi	M.0582/Maritim-2/09/2019	19-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	kirim 24/09/2019	M-348	24/09/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
16	Penyampaian Penilaian SKP Tahun 2019 di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman	Asdep -> Biro ACRB	M.0583/Maritim-2/09/2019	20-Sep-2019	Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	20-Sep-2019	-	Outcome FO	Digunakan Biro ACRB untuk pengambilan keputusan
17	Penyampaian Permohonan Audiensi Presiden dan CEO Vale S.A. kepada Presiden	Asdep -> Deputi	M.0584/Maritim-2/09/2019	20-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	20-Sep-2019	-	Outcome 3	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
18	Penyampaian Target Informasi Kinerja Tahun 2021-2024 Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Asdep -> Biro Renkeu	M.0585/Maritim-2/09/2019	23-Sep-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	23-Sep-2019	-	Outcome FO	Digunakan Karo Renkeu sebagai bahan pengambilan keputusan
19	Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Permasalahan Insentif Fiskal Yang Disampaikan Oleh Asosiasi Guna Kemudahan Berinvestasi Di Sektor Migas Dan Ketenagalistrikan	Asdep -> Deputi	M.0588/Maritim-2/09/2019	23-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	23-Sep-2019	-	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan rapat Deputi Bidang Kemaritiman, Jumat, 4 Oktober 2019
20	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Presiden dengan PT Vale Indonesia	Asdep -> Deputi	M.0589/Maritim-2/09/2019	23-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	23-Sep-2019	-	Outcome 3	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
21	Laporan Pelaksanaan Rapat Pembahasan Percepatan Penerbitan Pedoman Teknis Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)	Asdep -> Deputi	M.0590/Maritim-2/09/2019	27-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	27-Sep-2019	-	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
22	Laporan Pelaksanaan Rapat Pembahasan Percepatan Penerbitan Pedoman Teknis Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)	Asdep -> Deputi	M.0603/Maritim-2/09/2019	27-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	27-Sep-2019	-	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
23	Penyampaian KAK dan RAB Tahun Anggaran 2020 Keadanutan Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputi	M.0604/Maritim-2/09/2019	27-Sep-2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	27-Sep-2019	-	Outcome FO	Digunakan Deputi Bidang Administrasi sebagai bahan pertimbangan keputusan
24	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Penyiapan Masterplan Percepatan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah	Asdep -> Asdep	M.0605/Maritim-2/09/2019	30-Sep-2019	Asisten Deputi Bidang Perhubungan	-	-	30-Sep-2019	-	Outcome 1	Digunakan Asdep Perhubungan sebagai bahan pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
25	Permohonan Kehadiran Sekaligus Meresmikan Kilang Treated Distillate Aromatic Extract (TDAE) PT Enerco RPO Internasional di Batam	Asdep -> Deputi Asdep -> Deputi	M.0607/Maritim-2/09/2019	30-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	saya komunikasikan dengan esdi di kementerian perindustrian untuk pertimbangan sebagai bahan memo 01/10/2019				Outcome 3	Respon Deputi
26	Penerapan Skema Imbal Dagang Dalam Importasi Migas	Asdep -> Deputi	M.0612/Maritim-2/09/2019	30-Sep-2019	Deputi Bidang Kemaritiman		B.0373/Seskab/Maritim/10/2019	07-Okt-19	1. Menko Bidang Perekonomian; 2. Menteri ESDM; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Luar Negeri; 5. Menteri BUMN; 6. Menteri Kumann; 7. Kepala BKPM.	Outcome 1	Digunakan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
<b>OKTOBER 2019</b>											
1	Laporan Menghadiri The 6Th Asia Pacific Geopark Network (APGN) Symposium Tahun 2019, 3 September s.d. 5 September 2019 di NTB	Asdep -> Deputi	M.0614/Maritim-2/09/2019	02-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
2	Laporan Rapat Pelaksanaan Pembangunan PLTSa Kota Tangerang	Asdep -> Deputi	M.0618/Maritim-2/10/2019	03-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	perbaiki sesuai pembicaraan. 03/10/2019 diperbaiki & kemudian naik. 11/10/2019	M.0371/Maritim/10/2019	17/10/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Surat Seskab ke K/L
3	Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Insentif Fiskal Guna Meningkatkan Investasi dan Kemudahan Berusaha di Sektor Migas	Asdep -> Deputi -> Seskab	M.0619/Maritim-2/10/2019	03-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
4	Masukan untuk Penyusunan RPerpres tentang Percepatan Investasi Energi Terbarukan	Asdep -> Deputi	M.0622/Maritim-2/10/2019	03-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
5	Bahan Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Legal Opinion PLTSa Benowo, Kota Surabaya	Asdep -> Deputi	M.0627/Maritim-2/10/2019	04-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Legal Opinion PLTSa Benowo

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
6	Laporan Menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) Kajian Strategis "Penanaman Konsep Masterplan Percepatan Pembangunan Perekonomian Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah"	Asdep -> Asdep	M.0628/Maritim-2/10/2019	07-Okt-2019	Asisten Deputy Bidang Perhubungan	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Asdep sebagai bahan dalam pengambilan keputusan
7	Laporan Tindak Lanjut Penyusunan Legal Opinion PLTsa Benowo, Kota Surabaya	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0631/Maritim-2/10/2019	07-Okt-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	naik 11/10/2019	M.0363/Maritim/10/2019	11/10/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Respon Deputy
8	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0635/Maritim-2/10/2019	08-Okt-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	sdr wida, yg saya tandai di dibahas libatkan asdep-1 sdr willdan dam asdp-4, (bagaimana kedudukan pp ini dg permen yg mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan).9/10/2019	-	-	-	Outcome 2	Respon Deputy
9	Penyampaian Data Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan September 2019	Asdep -> Biro Renkeu	M.0642/Maritim-2/10/2019	08-Okt-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	Outcome FO	Digunakan Biro Renkeu sebagai bahan dalam pengambilan keputusan
10	Permohonan Persentasi Participating Interest (PI) Lebih Dari 10% Pada Wilayah Kerja (WK) Migas di Riau	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0644/Maritim-2/10/2019	09-Okt-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	naik. 11/10/2019	M.0364/Maritim/10/2019 M.0951/Seskab/10/2019	11/10/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Outcome 1	Surat Seskab ke K/L
11	Penyampaian Alur Proses Pembangkit Listrik	Asdep -> Deputy	M.0653/Maritim-2/10/2019	10-Okt-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
12	Penyampaian Matriks Janji Presiden Bulan Agustus 2019	Asdep -> Asdep	M.0654/Maritim-2/10/2019	11-Okt-2019	Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Asdep sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
13	Permohonan Presiden Untuk Membuka Pemeran Indo EBITKE ConEx 2019 ke-8 Tahun 2019	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0656/Maritim-2/10/2019	17-Okt-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	naik. 11/10/2019	M.0373/Maritim/10/2019	23/10/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Respon Deputy
14	1. Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tojo I Jeneponto-Sulawesi Selatan; 2. Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PLTSA) di Kota Surabaya.	Asdep -> Deputy	M.0661/Maritim-2/10/2019	21-Okt-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
15	Notulen Rapat Intern Wakil Presiden RI Tentang Ketenagalistrikan	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0663/Maritim-2/10/2019	21-Okt-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	lampiran surat Menadagri -> diperiksa naik. 21/10/2019	M.0374/Maritim/10/2019	23/10/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Naik ke Seskab

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Deputy/Seskab/Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
16	Penyampaian Buku Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2014-2019	Asdep -> Deputy	M.0664/Maritim-2/10/2019	21-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	M.0377/Maritim/10/2019	24/10/2019	Wakil Sekretaris Kabinet	Outcome FO	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
17	Penyampaian Matriks Tindak Lanjut Hasil Kajian Wawancara Tahun 2018-2019	Asdep -> Asdep	M.0667/Maritim-2/10/2019	23-Okt-2019	Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	Outcome 1	Digunakan Asdep sebagai bahan dalam pengambilan keputusan
18	Laporan Menghadiri Ground Breaking Konstruksi PLTSA Putri Cempo di Surakarta	Asdep -> Deputy	M.0669/Maritim-2/10/2019	29-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
19	Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan President Director and CEO PT. Siemens Indonesia dan Managing Board of Siemens AG	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0671/Maritim-2/10/2019	31-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	TU Deputy, tlg dikirim, soft copy sudah dikirim ke sdr gigit. 31/10/2019	M.0389/Maritim/10/2019	31/10/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Naik ke Seskab
<b>NOVEMBER 2019</b>											
1	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Tahun 2019	Asdep -> Deputy	M.0679/Maritim-2/10/2019	31-Okt-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
2	Pertemuan Akhir Tahun Anggaran 2019	Asdep -> Asdep	M.0680/Maritim-2/10/2019	01-Nop-2019	Asdep 1, 2, 3 dan 4	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Asdep sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
3	PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) DAN PELAKSANAAN PENAWARAN SECARA PRIORITAS DAN/ATAU LELANG WIUPK DI WILAYAH EKS PT VALE INDONESIA	Asdep -> Deputy	M.0681/Maritim-2/11/2019	01-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0683/Maritim-2/11/2019	01-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	M.0396/Maritim/11/2019	5 November 2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
5	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Terkait Revisi PNBSP Bidang Mineral dan Keterlibatan dalam Proses Penerbitan Rekomendasi Ekspor Bauksit, serta Hambatan Pengembangan Inovasi Teknologi di Bidang Energi.	Asdep -> Deputy	M.0684/Maritim-2/11/2019	01-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
6	Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Asdep -> Deputy	M.0686/Maritim-2/11/2019	06-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Deputy/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
7	Penyampaian Permohonan Revisi Tahun Anggaran 2019 Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kedepujian Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy	M.0696/Maritim-2/11/2019	06-Nop-2019	Deputy Bidang Administrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
8	Penyampaian Data Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan Oktober 2019	Asdep -> Karo AKRBB	M.0697/Maritim-2/11/2019	07-Nop-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Kepala Biro AKRBB sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
9	Bahan Rapat dan Peninjauan Lapangan PLTSA Benowo di Kota Surabaya	Asdep -> Deputy	M.0700/Maritim-2/11/2019	13-Nop-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan Rapat PLTSA di Surabaya
10	Permohonan Legal Opinion Terhadap Penetapan WIUKP serta Penawaran Prioritas dan/atau Lelang Terhadap Wilayah Hasil Pencucian PT Vale Indonesia	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0711/Maritim-2/11/2019	13-Nop-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	M.0415/Maritim/1/2019	1 November 2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
11	Laporan Perkembangan Pembangunan Instalasi Pengalihan Sampah Menjadi Energi Listrik di Kota Surabaya	Asdep -> Deputy -> Seskab	M.0712/Maritim-2/11/2019	19-Nop-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	D411/Maritim/11/2019	20 November 2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
12	Data Dukung dan Narasi Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dan Laporan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2019	Asdep -> Asdep	M.0714/Maritim-2/11/2019	19-Nop-2019	Asdep 1,3 dan 4	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Asdep sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
13	1. Laporan Progres Pengembangan Kilang dan Program Megaprojek Pengolahan dan Petrokimia; 2. Permohonan Ijin Perijinan Dinas Dalam Rangka Monitoring Kesiapan Peresmian Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) dan Perkembangan Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap.	Asdep -> Deputy	M.0718/Maritim-2/11/2019	19-Nop-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
14	Penyampaian Briefing Sheet Acara Indonesian Mining Association (IMA) Award 2019	Asdep -> Deputy -> Seskab -> Presiden	M.0719/Maritim-2/11/2019	20-Nop-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	M.0410/Maritim/11/2019 dan M.1063/Seskab/11/2019	20 November 2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Outcome 3	Naik ke Seskab dan Presiden
15	Laporan Perjalanan Dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Amerika Serikat dan Jepang, tanggal 20-26 September 2019	Asdep -> Deputy	M.0720/Maritim-2/11/2019	21-Nop-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	M.0419/Maritim/11/2019 dan M.0419/Maritim/11/2019	21 November 2019 dan 25 November 2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Outcome 1	Naik ke Seskab dan Presiden
16	Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan yang dibutuhkan untuk Penyiapan Proyek PLTSA Kota Bekasi dan PLTSA Kota Manado	Asdep -> Deputy	M.0725/Maritim-2/11/2019	21-Nop-2019	Deputy Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputi -> Deputi/Seskab/Presiden/KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
17	Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (PMK 89/2019)	Asdep -> Deputi -> Seskab	M.0727/Maritim-2/11/2019	21-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	0421/Maritim/11/2015	21-November 2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik Seskab
18	Laporan Rapat Dukungan Kementerian Keuangan Untuk Meningkatkan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi	Asdep -> Deputi	M.0729/Maritim-2/11/2019	21-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
19	Laporan Komisi Pengawas atas Kinerja SKK Migas Semester I Tahun 2019	Asdep -> Deputi -> Seskab -> Presiden	M.0730/Maritim-2/11/2019	21-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	M.0416/Maritim/11/2019 dan M.1080/Seskab/11/2019	21 November 2019 dan 25 November 2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Outcome 1	Naik ke Seskab dan Presiden
20	Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kabupaten Tapauulu Utara	Asdep -> Deputi	M.0731/Maritim-2/11/2019	22-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
21	Rapat Klarifikasi Dukungan Terhadap Peningkatan Kehandalan Penyediaan Listrik Jawa - Bali	Asdep -> Deputi	M.0734/Maritim-2/11/2019	25-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan rapat yang dilaksanakan Senin, 25 November 2019
22	Permohonan John Leong Kepada Presiden Untuk Presentasi	Asdep -> Deputi	M.0735/Maritim-2/11/2019	25-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	455/Maritim/12/2019	25-Des-19	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
23	BRIEFING SHEET Audiensi Sekretaris Kabinet dengan PT Vale Indonesia Tanggal 25 November 2019 di Kantor Sekretaris Kabinet	Asdep -> Deputi -> Seskab	M.0736/Maritim-2/11/2019	25-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	420/Maritim/11/2019	25 November 2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik Seskab
24	Laporan Rapat Klarifikasi Dukungan Terhadap Peningkatan Kehandalan Penyediaan Listrik Jawa - Bali	Asdep -> Deputi -> Seskab	M.0737/Maritim-2/11/2019	25-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	425/Maritim/11/2019	26 November 2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik Seskab
25	Laporan Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan PP Nomor 73 Tahun 2019 Khususnya terkait Kendaraan Bermotor Listrik	Asdep -> Deputi	M.0738/Maritim-2/11/2019	28-Nop-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
<b>DESEMBER 2019</b>											
1	Penyampaian Data Dukung Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2019 Kedeputian Bidang Kemaritiman	Asdep -> Biro AKB	M.0750/Maritim-2/11/2019	03-Des-2019	Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
2	Laporan Rapat Progres Pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2019	Asdep -> Deputi	M.0753/Maritim-2/11/2019	03-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	oke trims, arsip 05/12/2019	-	-	-	Outcome 1	Dispo Deputi



No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Deputy/ Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
3	Laporan Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pokja Pemantauan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Asdep -> Deputy	M.0754/Maritim-2/12/2019	05-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
4	Penyampaian Data Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output/Sub-Output/Komponen sesuai Rencana Kinerja (Renja) Bulan November 2019	Asdep -> Biro Renkeu	M.0758/Maritim-2/12/2019	06-Des-2019	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
5	BAHAN RAPAT KICK OFF MEETING TIM PERUMUS PEMBENTUKAN KOMITE STRATEGI FINANSIAL KORPORAT PT PLN (PERSERO)	Asdep -> Deputy	M.0765/Maritim-2/12/2019	06-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan rapat
6	Bahan Rapat Intern Tentang Energi	Asdep -> Deputy	M.0767/Maritim-2/12/2019	09-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 09/12/2019	M.0436/Maritim/12/2019 dan M.1141/Seskab/12/2019	09/12/2019 dan 10/12/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Outcome 3	Naik ke Seskab
7	Penyampaian Permohonan Revisi Tahun Anggaran 2019 Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kedepujian Bidang Kemaritiman	Asdep -> Biro Renkeu	M.0772/Maritim-2/12/2019	10-Des-2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
8	PENYAMPAIAN BAHAN FOCUS GROUP DISCUSSION DENGAN TEMA PERMASALAHAN DAN UPAYA SIMPLIFIKASI PERIZINAN DI SEKTOR HULU MIGAS INDONESIA	Asdep -> Deputy	M.0773/Maritim-2/12/2019	11-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan rapat
9	Laporan Kick-Off Meeting Tim Perumus Pembentukan Strategi Finansial Korporat PT PLN (Persero)	Asdep -> Deputy	M.0777/Maritim-2/12/2019	11-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	untuk bahan balasan kermenko ekon 13/12/2019	-	-	-	Outcome 1	Respon Deputy
10	Laporan Rapat Koordinasi Peningkatan Lifting Minyak Bumi Indonesia	Asdep -> Deputy	M.0778/Maritim-2/12/2019	11-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/ Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
11	Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman Tahun 2019	Asdep -> Deputy	M.0779/Maritim-2/12/2019	11-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	pak banyu, - tolong dikoordinasikan baik dg masing2 asdep- pemilihan responden sebaiknya sesuai dg pelaksanaan tugas sehari-hari /pertemuan atau hand dibawa o/ asdep (pada kesempatan rapat mengalokasikan waktu sendiri), 11/12/2019	B-1054/Maritim/12/2019		Kemenkomarvest, Kemenkoekon, KKP, KESDM, Kperhub, Kemenparekrافت	Outcome FO	Surat Deputy ke K/L
12	BAHAN FOCUS GROUP DISCUSSION PROSES PENGURUSAN PERIZINAN DALAM BISNIS PENGUSAHAAN PEMBANGKIT LISTRIK BERDASARKAN FAKTA DI LAPANGAN, DAN USULAN PENYEDERHANAANNYA	Asdep -> Deputy	M.0783/Maritim-2/12/2019	11-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	buatkan timeline kegiatan untuk tindak lanjut rapat ini 13/12/2019				Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
13	Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengalut Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Asdep -> Deputy	M.0782/Maritim-2/12/2019	11-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	perbaiki 16/12/2019 apakah kita dapat memberi pendapat yg lebih konkret, 16/12/2019, naik 31/12/2019	M-466			Outcome 2	Respon Deputy
14	Peran Serta Kedeputan Bidang Kemaritiman dalam United Nations Climate Change Conference (UNFCCC), Madrid, 30 November - 9 Desember 2019	Asdep -> Deputy	M.0783/Maritim-2/12/2019	16-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 20/12/2019	M-456	20/12/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
15	Persetujuan dan Tanggapan Atas Penyesuaian Tata Kelola dan Operasional PT PLN (Persero)	Asdep -> Deputy	M.0797/Maritim-2/12/2019	16-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 16/12/2019	M-452	16/12/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
16	Laporan Pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD) Permasalahan dan Upaya Simplifikasi Perizinan di Sektor Hulu Migas Indonesia	Asdep -> Deputy	M.0798/Maritim-2/12/2019	16-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
18	Permohonan Peresmian PLTMH Ilaga Kabupaten Puncak Papua	Asdep -> Deputy	M.0799/Maritim-2/12/2019	19-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	Naik 19/12/2019	M.0454/Maritim/12/2019 dan M.1175/Seskab/12/2019	19/12/2019	Sekretaris Kabinet dan Presiden	Outcome 3	Naik Seskab
19	Laporan Rapat Klarifikasi Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengalut Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Asdep -> Deputy	M.0806/Maritim-2/12/2019	23-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman					Outcome 2	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal	Tujuan Akhir Perihal Asdep -> Deputy/Seskab/Presiden/KL	NO TU ASDEP	TANGGAL	KEPADA Asdep -> Deputy/Seskab/Presiden/KL	DISPO DEPUTI	NO TU DEPUTI/ NO SURAT KELUAR	TANGGAL	KEPADA Deputy -> Deputy/Seskab/Presiden/ KL	ASSESSMENT CAPAIAN (IKK1, IKK2, IKK3) Output/Outcome	Keterangan
20	Laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menghadiri COP 3 Konvensi Minamata di Jenewa 24-29 November 2019	Asdep -> Deputy	M.0807/Maritim-2/12/2019	23-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	naik 28/12/2019	M-462	26/12/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 1	Naik ke Seskab
21	Penyampaian Permohonan Revisi Tahun Anggaran 2019 Asisten Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kedeputian Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy	M.0808/Maritim-2/12/2019	26-Des-2019	Deputi Bidang Administrasi	-	-	-	-	Outcome FO	Dimanfaatkan Depmin sebagai bahan pengambilan keputusan
22	Permohonan Audiensi Kepala Perwakilan ThorCon International, Pte. Ltd dengan Deputy Bidang Kemaritiman	Asdep -> Deputy	M.0815/Maritim-2/12/2019	27-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
23	Permohonan Peresmian Pabrik Treated Distillate Aromatic Extract (TDAE) PT Enerco RPO Internasional pada Februari 2020	Asdep -> Deputy	M.0820/Maritim-2/12/2019	30-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 3	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
24	Laporan Perkembangan Pembangunan Grass Root Refinery (GRR) Tuban	Asdep -> Deputy	M.0824/Maritim-2/12/2019	31-Des-2019	Deputi Bidang Kemaritiman	-	-	-	-	Outcome 1	Dimanfaatkan Deputy sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
45	Matriks Usulan Acara/Kegiatan Bidang Energi yang Perlu Kehadiran Presiden	Asdep -> Deputy	M.0826/Maritim-2/12/2019	29/01/2019	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	-	M-66	01/02/2019	Sekretaris Kabinet	Outcome 3	Naik ke Seskab

**REALISASI ANGGARAN**  
Per Pengelolaan Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun  
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan Kuitansi  
Halaman : 1 dari 6

		Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
			<b>JUMLAH REALISASI</b>	5.900.000.000	5.900.000.000	1.693.833.842	4.116.785.421	5.810.619.263	98,48	89.380.737
13	DEPUTI MARITIM			5.900.000.000	5.900.000.000	1.693.833.842	4.116.785.421	5.810.619.263	98,48	89.380.737
1301	ASDEP BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.050.000.000	1.050.000.000	204.119.460	834.950.091	1.039.069.551	98,95	10.930.449
06.5827	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.050.000.000	1.050.000.000	204.119.460	834.950.091	1.039.069.551	98,95	10.930.449
001	BANGUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.050.000.000	1.050.000.000	204.119.460	834.950.091	1.039.069.551	98,95	10.930.449
001.006	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan			1.050.000.000	1.050.000.000	204.119.460	834.950.091	1.039.069.551	98,95	10.930.449
501	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan			885.748.000	887.319.000	133.499.460	745.847.667	879.347.127	99,10	7.971.873
501-AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis			310.806.000	488.561.000	124.249.460	356.809.862	481.059.322	98,46	7.501.678
521211-RM	BELANJA BAHAN			35.880.000	42.228.000	39.474.000	0	39.474.000	93,47	2.754.000
-001				35.880.000	42.228.000	39.474.000	0	39.474.000	93,47	2.754.000
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA			2.500.000	0	0	0	0	0,00	0
-001				2.500.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA			15.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001				15.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA			257.426.000	446.333.000	84.775.460	356.809.862	441.585.322	98,93	4.747.678
-001				257.426.000	446.333.000	84.775.460	356.809.862	441.585.322	98,93	4.747.678
501-AB	Pengumpulan data			574.942.000	398.758.000	9.250.000	389.037.805	398.287.805	99,88	470.195
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA			129.381.000	72.285.000	0	72.284.900	72.284.900	99,99	100
-001				129.381.000	72.285.000	0	72.284.900	72.284.900	99,99	100
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA			32.000.000	12.400.000	9.250.000	2.700.000	11.950.000	96,37	450.000
-001				32.000.000	12.400.000	9.250.000	2.700.000	11.950.000	96,37	450.000
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI			413.561.000	314.073.000	0	314.052.905	314.052.905	99,99	20.095
-001				413.561.000	314.073.000	0	314.052.905	314.052.905	99,99	20.095
502	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan			121.456.000	133.076.000	70.620.000	59.500.200	130.120.200	97,77	2.955.800
502-AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis			118.456.000	133.076.000	70.620.000	59.500.200	130.120.200	97,77	2.955.800
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI			29.800.000	44.600.000	41.800.000	0	41.800.000	93,72	2.800.000
-001				29.800.000	44.600.000	41.800.000	0	41.800.000	93,72	2.800.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA			22.500.000	22.500.000	18.300.000	4.050.000	22.350.000	99,33	150.000
-001				22.500.000	22.500.000	18.300.000	4.050.000	22.350.000	99,33	150.000

Uraian

	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524119-RM	66.156.000	65.976.000	10.520.000	55.450.200	65.970.200	99,99	5.800
BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA							
-001	66.156.000	65.976.000	10.520.000	55.450.200	65.970.200	99,99	5.800
502.AB	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA							
-001	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
503	42.796.000	29.605.000	0	29.602.224	29.602.224	99,99	2.776
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelautan dan Perikanan							
503.AA	39.796.000	29.605.000	0	29.602.224	29.602.224	99,99	2.776
524114-RM	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis							
BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA							
-001	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	36.796.000	29.605.000	0	29.602.224	29.602.224	99,99	2.776
BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA							
-001	36.796.000	29.605.000	0	29.602.224	29.602.224	99,99	2.776
503.AB	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA							
-001	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0
1302	2.750.000.000	2.750.000.000	747.906.651	1.952.872.751	2.700.779.402	98,21	49.220.598
ASDEP BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
06.5828	2.750.000.000	2.750.000.000	747.906.651	1.952.872.751	2.700.779.402	98,21	49.220.598
DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
001	2.750.000.000	2.750.000.000	747.906.651	1.952.872.751	2.700.779.402	98,21	49.220.598
BALANCAR REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
001.006	2.750.000.000	2.750.000.000	747.906.651	1.952.872.751	2.700.779.402	98,21	49.220.598
Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
506	1.672.755.000	1.406.883.000	291.647.120	1.112.843.664	1.404.490.784	99,83	2.392.216
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
506.AA	315.167.000	545.525.000	210.336.520	333.262.768	543.599.288	99,64	1.925.712
521211-RM	19.500.000	24.150.000	23.809.500	0	23.809.500	98,59	340.500
Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis							
BELANJA BAHAN							
-001	19.500.000	24.150.000	23.809.500	0	23.809.500	98,59	340.500
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA							
-001	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0
521219-RM	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0
BELANJA JASA PROFESI							
-001	44.700.000	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	100,00	0
522151-RM	44.700.000	11.100.000	11.100.000	0	11.100.000	100,00	0
BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA							
-001	81.250.000	160.982.000	122.755.000	37.100.000	159.855.000	99,29	1.127.000
524114-RM	81.250.000	160.982.000	122.755.000	37.100.000	159.855.000	99,29	1.127.000
BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA							
-001	164.717.000	349.293.000	52.672.020	296.162.768	348.834.788	99,86	458.212
524119-RM	164.717.000	349.293.000	52.672.020	296.162.768	348.834.788	99,86	458.212
BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA							
-001	374.116.000	249.060.000	23.700.000	225.355.618	249.055.618	99,99	4.382
506.AB	93.422.000	26.839.000	0	26.835.600	26.835.600	99,98	3.400
524111-RM	93.422.000	26.839.000	0	26.835.600	26.835.600	99,98	3.400
BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA							
-001	27.300.000	37.500.000	23.700.000	13.800.000	37.500.000	100,00	0
524113-RM	27.300.000	37.500.000	23.700.000	13.800.000	37.500.000	100,00	0
BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA							
-001	27.300.000	37.500.000	23.700.000	13.800.000	37.500.000	100,00	0

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	253.394.000	184.721.000	0	184.720.018	184.720.018	99,99	982
-001		253.394.000	184.721.000	0	184.720.018	184.720.018	99,99	982
506.AC	- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang Kemaritiman	983.472.000	612.298.000	57.610.600	554.225.278	611.835.878	99,92	462.122
521211-RM	BELANJA BAHAN	53.820.000	48.300.000	26.468.000	21.500.000	47.968.000	99,31	332.000
-001		53.820.000	48.300.000	26.468.000	21.500.000	47.968.000	99,31	332.000
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	99.600.000	24.900.000	24.800.000	0	24.800.000	99,59	100.000
-001		99.600.000	24.900.000	24.800.000	0	24.800.000	99,59	100.000
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	23.512.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		23.512.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	570.091.000	360.093.000	6.342.600	353.720.453	360.063.053	99,99	29.947
-001		570.091.000	360.093.000	6.342.600	353.720.453	360.063.053	99,99	29.947
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	236.449.000	179.005.000	0	179.004.825	179.004.825	99,99	175
-001		236.449.000	179.005.000	0	179.004.825	179.004.825	99,99	175
507	- Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	212.373.000	80.104.000	0	80.103.600	80.103.600	99,99	400
507.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	212.373.000	80.104.000	0	80.103.600	80.103.600	99,99	400
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	97.476.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0
-001		97.476.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0
508	- Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	18.476.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0
508.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	18.476.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	4.500.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		4.500.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	13.976.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0
-001		13.976.000	3.270.000	0	3.270.000	3.270.000	100,00	0
508.AB	PENGUMPULAN DATA	79.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	79.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		79.000.000	0	0	0	0	0,00	0
509	- Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedepulatan Bidang Kemaritiman	767.396.000	1.259.743.000	456.259.531	756.655.487	1.212.915.018	96,28	46.827.982
509.AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	731.870.000	1.245.479.000	456.259.531	742.631.652	1.198.891.183	96,25	46.587.817
521211-RM	BELANJA BAHAN	39.350.000	129.400.000	124.532.500	0	124.532.500	96,23	4.867.500
-001		39.350.000	129.400.000	124.532.500	0	124.532.500	96,23	4.867.500
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	23.000.000	24.200.000	19.100.000	0	19.100.000	78,92	5.100.000
-001		23.000.000	24.200.000	19.100.000	0	19.100.000	78,92	5.100.000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	94.000.000	511.601.000	188.405.000	290.290.000	478.695.000	93,56	32.906.000
-001		94.000.000	511.601.000	188.405.000	290.290.000	478.695.000	93,56	32.906.000

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	575.520.000	580.278.000	124.222.031	452.341.652	576.563.683	99,35	3.714.317
509.AB	-001 Pengumpulan Data	575.520.000	580.278.000	124.222.031	452.341.652	576.563.683	99,35	3.714.317
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	35.526.000	14.264.000	0	14.023.835	14.023.835	98,31	240.165
-001	-001	35.526.000	14.264.000	0	14.023.835	14.023.835	98,31	240.165
1303	ASDEP BIDANG PERHUBUNGAN	1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
06.5829	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERHUBUNGAN	1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
001.006	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
001.006	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Perhubungan	1.050.000.000	1.050.000.000	397.725.480	638.481.285	1.036.206.765	98,68	13.793.235
511	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan	833.923.000	928.070.000	278.887.980	636.681.285	915.569.265	98,65	12.500.735
511.AA	Pengumpulan data	392.744.000	263.207.000	141.205.000	112.822.000	254.027.000	96,51	9.180.000
521211-RM	BELANJA BAHAN	50.000.000	55.890.000	46.805.000	0	46.805.000	83,74	9.085.000
-001	-001	50.000.000	55.890.000	46.805.000	0	46.805.000	83,74	9.085.000
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	285.444.000	86.822.000	0	86.822.000	86.822.000	100,00	0
-001	-001	285.444.000	86.822.000	0	86.822.000	86.822.000	100,00	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	57.300.000	120.495.000	94.400.000	26.000.000	120.400.000	99,92	95.000
-001	-001	57.300.000	120.495.000	94.400.000	26.000.000	120.400.000	99,92	95.000
511.AB	Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya	441.179.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735
522141-RM	BELANJA SEWA	1.810.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-001	1.810.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	214.001.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735
-001	-001	214.001.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	214.001.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735
-001	-001	214.001.000	664.863.000	137.682.980	523.859.285	661.542.265	99,50	3.320.735
512	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan	225.368.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-001	225.368.000	0	0	0	0	0,00	0
512.AA	Pengumpulan data	62.093.000	52.550.000	51.300.000	600.000	51.900.000	98,76	650.000
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-001	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	17.700.000	45.800.000	45.300.000	0	45.300.000	98,90	500.000
-001	-001	17.700.000	45.800.000	45.300.000	0	45.300.000	98,90	500.000
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	20.393.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-001	20.393.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	9.000.000	6.750.000	6.000.000	600.000	6.600.000	97,77	150.000
-001	-001	9.000.000	6.750.000	6.000.000	600.000	6.600.000	97,77	150.000
513	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perhubungan	153.984.000	69.380.000	67.537.500	1.200.000	68.737.500	99,07	642.500
-001	-001	153.984.000	69.380.000	67.537.500	1.200.000	68.737.500	99,07	642.500
513.AA	Pengumpulan Data	123.334.000	38.730.000	38.237.500	0	38.237.500	98,72	492.500
521211-RM	BELANJA BAHAN	50.000.000	18.630.000	18.287.500	0	18.287.500	98,16	342.500

		Uraian								
		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran		
-001		50.000.000	18.630.000	18.287.500	0	18.287.500	98,16	342.500		
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	48.434.000	0	0	0	0	0,00	0		
-001		48.434.000	0	0	0	0	0,00	0		
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	7.500.000	7.500.000	7.350.000	0	7.350.000	98,00	150.000		
-001		7.500.000	7.500.000	7.350.000	0	7.350.000	98,00	150.000		
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	17.400.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	100,00	0		
-001		17.400.000	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	100,00	0		
513-AB	Rapat koordinasi/seminar/fgd/kegiatan sejenisnya	30.650.000	30.650.000	29.300.000	1.200.000	30.500.000	99,51	150.000		
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	30.650.000	30.650.000	29.300.000	1.200.000	30.500.000	99,51	150.000		
-001		30.650.000	30.650.000	29.300.000	1.200.000	30.500.000	99,51	150.000		
1304	ASPEK BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455		
06.5830	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455		
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM	1.050.000.000	1.050.000.000	344.082.251	690.481.294	1.034.563.545	98,52	15.436.455		
001.006	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Kepariwisataa, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	838.716.000	976.208.000	333.482.251	628.522.785	962.005.036	98,54	14.202.964		
516	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataa, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	686.292.000	795.926.000	239.186.213	549.603.565	788.789.778	99,10	7.136.222		
516-AA	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	51.680.000	66.240.000	64.840.000	0	64.840.000	97,88	1.400.000		
521211-RM	BELANJA BAHAN	51.680.000	66.240.000	64.840.000	0	64.840.000	97,88	1.400.000		
-001		10.000.000	0	0	0	0	0,00	0		
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0		
-001		10.000.000	0	0	0	0	0,00	0		
522141-RM	BELANJA SEWA	14.277.000	0	0	0	0	0,00	0		
-001		14.277.000	0	0	0	0	0,00	0		
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	36.400.000	18.000.000	15.000.000	0	15.000.000	83,33	3.000.000		
-001		36.400.000	18.000.000	15.000.000	0	15.000.000	83,33	3.000.000		
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	49.900.000	196.350.000	131.300.000	63.650.000	194.950.000	99,28	1.400.000		
-001		49.900.000	196.350.000	131.300.000	63.650.000	194.950.000	99,28	1.400.000		
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	380.254.000	515.336.000	28.046.213	485.953.565	513.999.778	99,74	1.336.222		
-001		380.254.000	515.336.000	28.046.213	485.953.565	513.999.778	99,74	1.336.222		
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	143.781.000	0	0	0	0	0,00	0		
-001		143.781.000	0	0	0	0	0,00	0		
516-AB	Pengumpulan Data	152.424.000	180.282.000	94.296.038	78.919.220	173.215.258	96,08	7.066.742		
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	140.424.000	173.532.000	91.146.038	76.519.220	167.665.258	96,61	5.866.742		
-001		140.424.000	173.532.000	91.146.038	76.519.220	167.665.258	96,61	5.866.742		
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	12.000.000	6.750.000	3.150.000	2.400.000	5.550.000	82,22	1.200.000		
-001		12.000.000	6.750.000	3.150.000	2.400.000	5.550.000	82,22	1.200.000		
517	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan	157.724.000	51.892.000	5.550.000	45.158.509	50.708.509	97,71	1.183.491		



Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
517.AA	perundang-undangan di bidang Keperwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim							
	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	157.724.000	51.892.000	5.550.000	45.158.509	50.708.509	97,71	1.183.491
	BELANJA BAHAN	31.050.000	2.070.000	1.950.000	0	1.950.000	94,20	120.000
	-001	31.050.000	2.070.000	1.950.000	0	1.950.000	94,20	120.000
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	29.600.000	7.900.000	3.600.000	3.920.000	7.520.000	95,18	380.000
	-001	29.600.000	7.900.000	3.600.000	3.920.000	7.520.000	95,18	380.000
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	97.074.000	41.922.000	0	41.238.509	41.238.509	98,36	683.491
	-001	97.074.000	41.922.000	0	41.238.509	41.238.509	98,36	683.491
518	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Keperwisataan, Riset dan Teknologi, dan L	53.560.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000
	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis	16.560.000	0	0	0	0	0,00	0
	BELANJA BAHAN	16.560.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	16.560.000	0	0	0	0	0,00	0
	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	37.000.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000
	-001	37.000.000	21.900.000	5.050.000	16.800.000	21.850.000	99,77	50.000

## DATA CAPAIAN TAHUN 2015-2018 BERDASARKAN LKJ

UNIT	SASARAN	INDIKATOR*	2018			2017			2016**			2015**			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
ASDEP 2 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan Pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%	24,61%	24,61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%	25,92%	25,92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat, pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	55,81%	55,81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Maritim		hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Kedeputian Bidang Maritim yang dilakukan oleh inspektorat Sekretariat Kabinet	77	100%	100%	BB(77)	BB(78)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku	100%	16,67%	16,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

\* Indikator yang tertera dalam database ini menggunakan indikator terbaru, frasa "ditindaklanjuti" yang tertera pada indikator tahun 2015-2016 diasumsikan sesuai dengan "disetujui".

\*\* Pada tahun 2015-2016 terdapat 6 (enam) indikator untuk sasaran "Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas dibidangG kemaritiman". Pada tahun berikutnya, indikator yang berisi ketepatan waktu dihilangkan.

## CATATAN

## DATA OUTPUT-OUTCOME 2015-2018

UNIT	SASARAN	INDIKATOR*	2019		2018		2017		2016		2015	
			OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME
ASDEP 2 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan Pemerintah dibidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	189	189	195	48	242	242	136	136	48	48
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	11	11	27	7	19	19	44	44	14	14
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat, pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	41	41	43	24	73	73	100	100	33	33
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Maritim	hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Kedeputian Bidang Maritim yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	77	77	77	77	BB(78)	BB(78)				
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku			96	16	28dok	28dok			13dok	13dok

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

No	Pernyataan	Checklist	Halaman	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√	-
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√	iv
		3. LKj telah enyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√	23
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√	70
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	11
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	64
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√	-
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	23
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	-
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	11
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√	15
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√	13
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memdai	-	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√	15
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√	17
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√	23

Kepala Bidang Fasilitas Operasional  
Kedeputan Bidang Kemaritiman

  
 Sarmini

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
SESUAI MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
NOMOR: M.513/ADM/11/2019 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT KABINET, ESELON I DAN ESELON II TAHUN 2019**

No	Pernyataan		Checklist	Halaman
1	BAB I	1. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	√	8
		2. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	√	12
2	BAB III	1. Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	√	23
		2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi) . Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. Template grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	√	64
3	Lampiran	Checklist FO sesuai edaran Depmin	√	

Kepala Bidang Fasilitas Operasional  
Kedeputan Bidang Kemaritiman

  
 Sarmini